

PERSEPSI MASYARAKAT TIONGHOA TERHADAP KEBERADAAN PARTAI  
LOKAL DI ACEH

MASYARAKAT TIONGHOA GAMPONG MULIA

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

CUT NYAK MEULIGOE

NIM. 150801004

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan

Prodi Ilmu Politik

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY

DARUSSALAM- BANDA ACEH

2019

PERSEPSI MASYARAKAT TIONGHOA TERHADAP PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH  
(STUDY KASUS MASYARAKAT TIONGHOA GAMPONG MULIA)

S K R I P S I

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Politik

Oleh:

CUT NYAK MEULIGOE

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Prodi Ilmu Politik

NIM: 150801004

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,



Dr. Phil. Saiful Akmal, MA

NIP: 198203012008011006

Pembimbing II



Aklima, S. Fil, MA

NIP: 196107061991011000

PERSEPSI MASYARAKAT TIONGHOA TERHADAP KEBERAAN PARTAI LOKAL DI  
ACEH

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Politik

Pada Hari/Tanggal :

Rabu, 8 Januari 2020  
1 jumadil-ula1441

di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

  
Dr. Phil. Saiful Akmal, MA  
NIP:198203012008011006

Sekretaris,

  
Aklima, S.Fil.I., MA  
NIP:196107061991011000

Penguji I,

  
Dr. Muslim Zainuddin, M. Si  
NIP:19661010231994021001

Penguji II,

  
Eka Januar, S. Soc., Sc  
NIP:198401012015031003

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh



  
Dr. Ernita Dewi, S Ag., M.Hum  
NIP:197307232000032002

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Cut Nyak Meuligoe

NIM : 150801004

Jurusan : Ilmu Politik

Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan

Judul skripsi : Persepsi Masyarakat Tionghoa Terhadap Partai Politik Lokal Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini,saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini,maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR - RANIRY

Banda Aceh, 11 Desember 2019

Yang Menyatakan,



(CUT NYAK MEULIGOE)

# **Persepsi Masyarakat Tionghoa Terhadap Keberadaan Partai Lokal Di Aceh**

Cut nyak meuligoe

Fakultas ilmu sosial dan ilmu pemerintahan

Nim: 150801004

## **ABSTRAK**

### Latar belakang

Partai lokal adalah hasil dari perjanjian damai antara pemerintah Indonesia dan masyarakat Aceh, wujud adanya partai lokal ialah untuk dapat menampung aspirasi dari masyarakat lokal agar apresiasinya dapat tersampaikan ke pemerintahan pusat. Indonesia hadir dengan multikultural baik dari segi Budaya, Agama, dan Etnisitas. Aceh merupakan wilayah dengan keistimewaan yang di berikan setelah referendum yaitu dapat membentuk partai lokal yang mana itu merupakan salah satu hasil dari kesepakatan antara pihak pemerintah dan GAM. Sejauh yang di diharapkan partai lokal dapat menampung aspirasi tanpa pandang bulu, gampong mulia adalah salah satu gampong kerukunan yang menjadi target peneliti untuk melihat persepsi mereka terhadap partai lokal yang ada di Aceh sendiri. Hipotesa awal penelti adalah peneliti melihat adanya pengaruh yang mana selama ini di ketahui bahwa Gampong Mulia merupakan Gampong kerukunan sehingga peneliti melihat adanya efek kepada pandangan politik lokal, yang akan memicu daya tarik masyarakat Tionghoa akan partai lokal yang di dasari oleh faktor lingkungan yang telah menjadikan masyarakat Tionghoa dan non-Tionghoa hidup berdampingan tanpa pergesekan antar masyarakat sehingga Gampong tersebut di nobatkan sebagai Gampong kerukunan. Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah: untuk menjelaskan Bagaimana persepsi masyarakat Tionghoa terhadap keberadaan partai lokal dan apa saja kontribusi yang seharusnya diterima masyarakat tionghoa dari partai lokal. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Teori yang digunakan yaitu teori persepsi dan politik identitas. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa (1) partai politik lokal merupakan partai yang bagus di buktikan dengan sudah adanya kontribusi yang di dapatkan oleh masyarakat Tionghoa dari pemerintah yang mana kontribusi tersebut untuk kemaslahatan masyarakat Tionghoa dibuktikan dengan adaya kenopi pasar peunayong, di ajak bergabung menjadi kader partai lokal(2) adanya hubungan atau interaksi yang kian membaik antara masyarakat Tionghoa dan masyarakat Aceh di sekitarnya.

Kata kunci: Persepsi, Masyarakat Tionghoa, Politik Identitas

## KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, kasih sayang dan karunia kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan Skripsi dengan Judul ***“Persepsi Masyarakat Tionghoa Terhadap Partai Lokal Aceh ( Study Kasus : Masyarakat Tionghoa Gampong Mulia)***. Diajukan sebagai syarat untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi demi memperoleh gelar sarjana ilmu politik pada Program studi Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Sholawat dan salam penulis sanjungkan kepada pangkuan Rasulullah SAW. Dengan selesainya skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan dan dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya, penulis persembahkan kepada yang terhormat :

1. Dr. Ernita Dewi, S.Ag, M,Hum, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada Bapak Dr. Phil. Saiful Akmal, MA selaku Pembimbing I dengan tulus ikhlas dan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan dan bimbingan serta dukungan mulai dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini kepada penulis.
3. Kepada ibu Aklima, S.Fil, MA, selaku pembimbing II yang sudah banyak membantu penulisan skripsi ini serta meluangkan waktu dan tenaga untuk penulis.
4. Responden yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan guna dijadikan data pada penelitian ini.

5. Terimakasih juga Pada Ayahanda Syarifuddin Dan Ibunda Maini serta segenap keluarga yang senantiasa memberikan kasih sayang dan dukungan moral maupun materil yang tiada henti sehingga skripsi ini selesai. Semoga Allah memberikan balasan kebahagiaan dunia akhirat.
6. Terimakasih untuk teman-teman dan yang terutamanya terimakasih kepada adik tercinta yang telah ikut andil dalam pembuatan skripsi ini dan senantiasa memberi semangat untuk saya dalam menulis skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa, dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan, baik dari segi penyajian, maupun segi materi. Oleh karenanya, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran serta kritik yang bersifat membangun dari berbagai pihak, sehingga akan memberikan suatu informasi yang berguna bagi ilmu pengetahuan. Penulis berharap skripsi ini dapat bermamfaat bagi penulis dan pembaca menjadi bahan belajar dan inspirasi untuk menciptakan karya yang lebih bagus lagi.

Banda Aceh, 26 November 2019

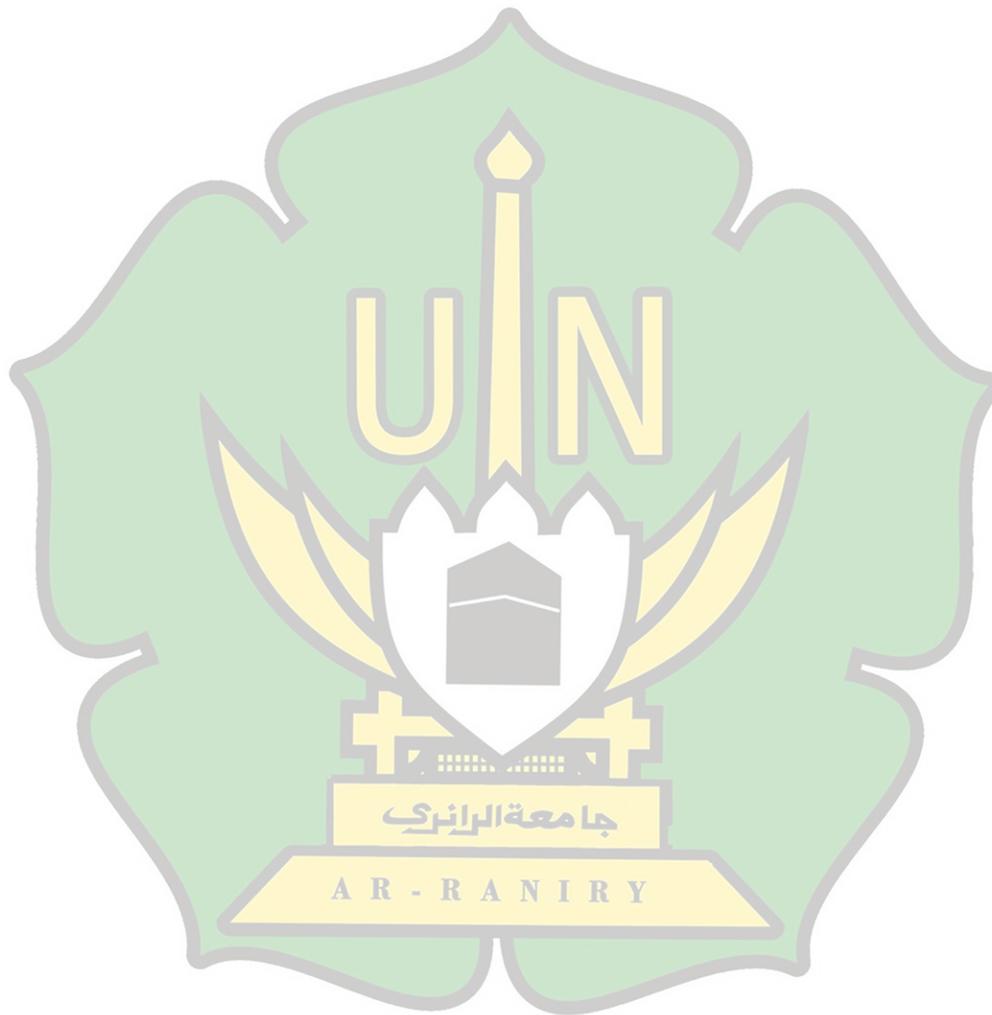
Penulis,

**Cut Nyak Meuligoe**

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Model hubungan antara etnis Cina dan etnis Aceh

19



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Dokumentasi Wawancara

Lampiran 2: Surat Rekomendasi Penelitian

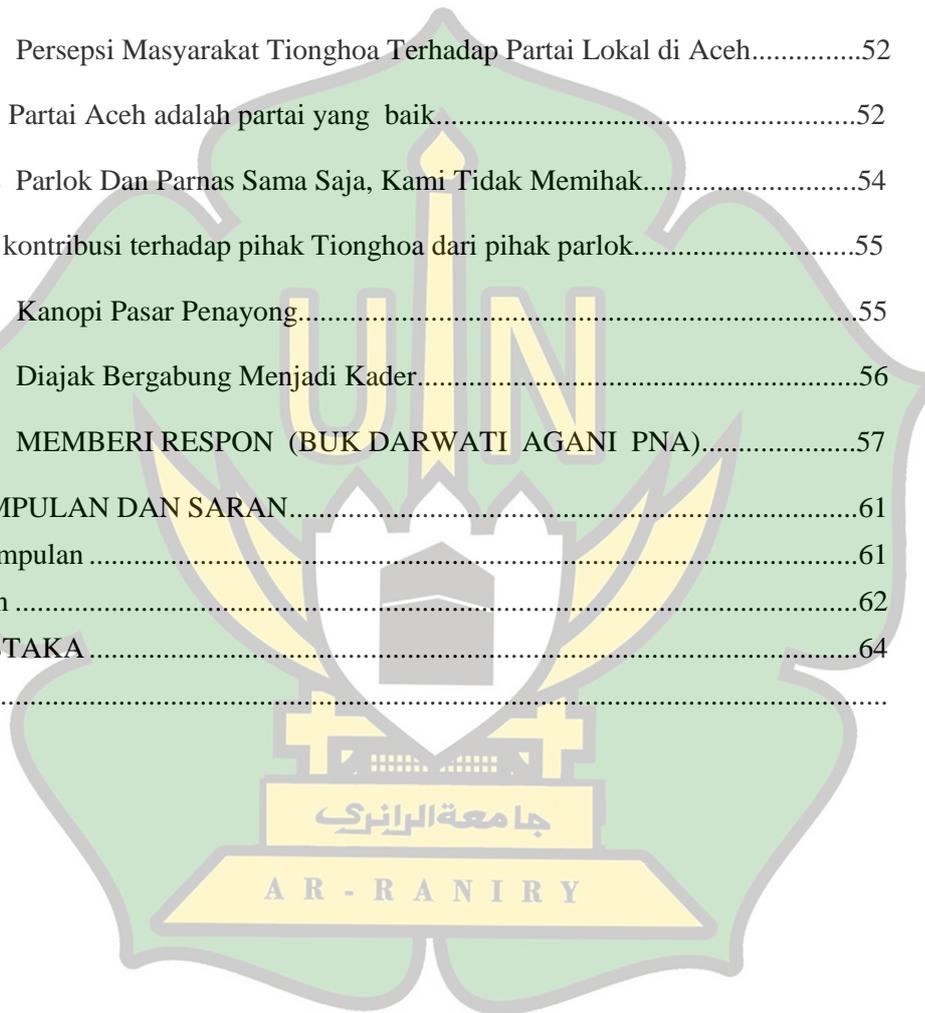
Lampiran 3: Daftar Riwayat Hidup



## Daftar isi

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iiii
DAFTAR TABEL .....	vi
DAFTAR LAMPIRAN .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
1.4.1 Secara teoritis.....	5
1.4.2 Secara praktis.....	6
1.5 Kajian Pustaka .....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>12</b>
2.1 Penjelasan Istilah .....	12
2.1.1 Masyarakat Tionghoa.....	12
2.1.2 Etnis Tionghoa.....	21
2.2 Teori.....	21
2.2.1 teori persepsi .....	21
2.2.2 Type-Type Persepsi.....	23
2.2.3 Teori persepsi dalam perspektif politik dan budaya .....	25
2.2.3.1 Politik Dan Budaya.....	25
2.2.4 Politik Identitas .....	27
2.2.5 Peluang Politik Minoritas.....	33
2.2.6 Partai Lokal.....	34
2.2.7 Partai Politik Lokal di Indonesia.....	35
2.2.8 Partai politik lokal Aceh .....	36
<b>BAB III METODELOGI PENELITIAN</b> .....	<b>44</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	44
3.2 Lokasi Penelitian .....	45

3.3 Informan Penelitian.....	45
3.4 Sumber data .....	46
3.4.1 Data Primer .....	46
3.4.2 Data Skunder.....	46
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	47
3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	47
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>50</b>
4.1 letak Geografis Gampong Mulia.....	50
4.2 Hasil Penelitian.....	52
4.2.1 Persepsi Masyarakat Tionghoa Terhadap Partai Lokal di Aceh.....	52
4.2.1.1 Partai Aceh adalah partai yang baik.....	52
4.2.1.2 Parlok Dan Parnas Sama Saja, Kami Tidak Memihak.....	54
4.3 Janji kontribusi terhadap pihak Tionghoa dari pihak parlok.....	55
4.3.1 Kanopi Pasar Penayong.....	55
4.3.2 Diajak Bergabung Menjadi Kader.....	56
4.3.3 MEMBERI RESPON (BUK DARWATI AGANI PNA).....	57
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>61</b>
5.1 Kesimpulan .....	61
5.2 Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>.....</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu bangsa yang terdiri atas berbagai etnis, ras dan budaya yang tersebar diseluruh penjuru Nusantara. Keberagaman etnis tersebut membuat Indonesia kaya akan kebudayaan dengan latar belakang keberagaman yang dimiliki. Masyarakat Indonesia tersebar diseluruh pelosok negeri ini baik itu dari masyarakat pribumi atau nonpribumi (Tionghoa). Masyarakat Tionghoa dianggap sebagai imigran karena menduduki Nusantara pada saat 9 Masehi yang lalu.<sup>1</sup>

MoU (*Memorandum Of Understanding*) Helsinki 15 Agustus 2005 telah mengakhiri konflik yang berkepanjangan antara RI-GAM di Aceh. Kesepakatan dan kesepahaman antara kedua belah pihak untuk berdamai serta memelihara perdamaian di Aceh sebagai wujud patuh terhadap penandatanganan MoU tersebut. Perdamaian yang mengikat kedua belah pihak tersebut kemudian di konvensi kedalam Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh. Pasal 75 UUPA Nomor 11 Tahun 2006 menjadi pasal yang paling dipermasalahkan oleh banyak kalangan karena memberi hak bagi daerah Aceh untuk membentuk partai lokal yang berbasis kedaerahan di Aceh. Partai politik lokal di Aceh baru terbentuk setelah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Partai Politik Lokal di Aceh sebagai dasar

---

<sup>1</sup>A.Rani Usman *Etnis Cina Perantauan Di Aceh*. Cet1 (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia February, 2009), hlm.1.

hukum untuk melaksanakan Pasal 75 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Partai politik lokal yang akan difungsikan sebagai kotak aspirasi politik bagi seluruh rakyat Aceh.<sup>2</sup>

Banda Aceh merupakan wilayah yang penduduknya terdiri dari berbagai macam etnis diantaranya Jawa, Batak, Padang, dan juga etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa adalah salah satu etnis minoritas yang mana penayong menjadi wilayah domisili mereka, dimana penayong merupakan bagian dari kecamatan Kuta Alam yang menjadi daerah pencinaan oleh mayoritas penduduk etnis Tionghoa.

Suku bangsa Tionghoa (etnis cina) di Indonesia adalah salah satu etnis yang ada di Indonesia, dan etnis Tionghoa ini bisa menyebut dirinya dengan istilah suku Tenglang (Hokkien), Tengahan (Tiochu), Atau Thongnyin (Hakka). Leluhur orang Tionghoa-Indonesia bermigrasi secara bergelombang sejak ribuan tahun yang lalu melalui kegiatan perniagaan. Migrasi abad ke-7 yang pernah terjadi akibat negara asal mereka Cina yang telah memiliki permasalahan yang membuat terjadinya migrasi besar besaran ke Asia Tenggara.<sup>3</sup>

Kebudayaan dan sejarah, penduduk Tionghoa yang bermigrasi ke Indonesia bisa di bagi atas beberapa kelompok. Kelompok yang paling umum adalah kaum peranakan yang kebudayaannya sudah membur dengan bangsa Indonesia dan kaum totok yang masih memegang teguh budaya asal mereka.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>UU Nomor 2 Tahun 2008 Jo UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

<sup>3</sup>Rani Usman A, *Etnis Cina Perantauan Di Aceh*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2009, 45

<sup>4</sup>Suryadinata Leo, *Negara Dan Etnis Tionghoa, Kasus Indonesia*, Jakarta, Pustaka LP3ES Indonesia, 2002, 54

Tsunami yang melanda Aceh pada 26 Desember 2004 menjadi duka bagi masyarakat Aceh, khususnya Indonesia dan dunia pada umumnya pada saat itu termasuk etnis Tionghoa terutama yang tinggal menetap di Banda Aceh menjadi korban dari fenomena alam tersebut. Tsunami selain membawa bencana untuk Acehkan tetapi dengan kejadian alam tersebut terciptalah kedamaian di bumi serambi Mekkah dengan penandatanganan MOU yang mana setelah 30 tahun konflik melanda Aceh MOU menjadi babak awal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Aceh.

Penandatanganan itu sendiri dilakukan di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005. Etnis Tionghoa sering disebut-sebut sebagai kelompok yang menutup diri dari aktivitas politik, dalam kelompok sosial tersebut terdapat seperangkat norma, nilai dan gagasan yang berlaku dan tersosialisasikan melalui proses yang panjang. Inilah yang nantinya akan mempengaruhi terhadap preferensi dan perilaku politik. Dalam memilih kepala daerah etnis Tionghoa memiliki hak yang sama dalam menentukan pilihan, terutama di Aceh etnis Tionghoa lebih banyak yang berkecimpung di bidang ekonomi ketimbang berpartisipasi dalam perpolitikan, dikarenakan etnis Tionghoa merupakan jumlah yang minoritas sehingga tidak mampu menghimpun jumlah suara. Sehingga hal ini, menjadikan sangat sedikit partai politik yang secara terang terangan menjadikan isu Tionghoa ini sebagai isu utama.<sup>5</sup>

Hipotesa awalnya ialah peneliti melihat adanya pengaruh yang mana selama ini diketahui bahwa Gampong Mulia merupakan gampong kerukunan

---

<sup>55</sup>A.Rani Usman, 2009, *Etnis Cina Perantauan di Aceh*, Jakarta. Yayasan Obor Indonesia. Hlm

sehingga peneliti melihat adanya efek kepada pandangan politik lokal, yang akan memicu daya tarik masyarakat Tionghoa akan partai lokal yang di dasari oleh faktor lingkungan yang telah menjadikan masyarakat Tionghoa dan non-Tionghoa hidup berdampingan tanpa pergesekan antar masyarakat sehingga gampong tersebut di nobatkan sebagai gampong kerukunan. Yang mana bahwa sejak dulu masyarakat Tionghoa hanya menjadi sebagai pasokan suara tambahan oleh pihak partai. Dimana jumlah minoritas yang dikumpulkan mampu untuk menyongsong calon legislatif untuk menempati kursi kekuasaannya, meski dengan jumlah yang minoritas pihak Tionghoa seringkali di jadikan sebagai pasokan suara tambahan oleh pihak lain, baik itu dari pihak independen maupun pihak partai, terutama partai lokal.

Seharusnya pihak Tionghoa dapat memberikan suaranya untuk calon yang datang dari pihak atau kalangannya agar hak-hak minoritas mampu di dapatkan kembali, dan mereka tidak hanya di jadikan pasokan suara tapi juga mampu menyuarakan hak –minoritas di parlement. Namun sangat di sayangkan dari kalangan minoritas sudah tak lagi ingin maju ke parlemen dengan alasan mereka hanya di jadikan sebagai alat oleh pihak kepentingan sehingga hanya hal-hal yang menguntungkan pihak kepentingan yang lebih diutamakan sedangkan hal yang dibutuhkan oleh pihak minoritas tidak menjadi penting, seringkali hal ini di kesampingkan. Hingga pada akhirnya, sudah tidak ada lagi keterwakilan pihak minoritas di kalangan parlemen<sup>6</sup>.

---

<sup>66</sup>A.Rani Usman, 2009, *Etnis Cina Perantauan di Aceh, Jakarta*. Yayasan Obor Indonesia. Hlm

Ketertapan Etnis Tionghoa terhadap perpolitikan memicu keingintahuan saya untuk mengkaji hal tersebut. Agar kita mengetahui pandangan atau persepsi tersendiri dari pihak minoritas ini terhadap partai politik khususnya parlok (partai lokal) di Aceh. Etnis Tionghoa punya hak yang sama untuk terjun langsung atau ikut serta dalam perpolitikan serta berkecimpung kedalam partai manapun.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah persepsi masyarakat Tionghoa terhadap keberadaan partai lokal di Aceh?
2. Apa Janji kontribusi terhadap pihak Tionghoa dari pihak parlok

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat Tionghoa terhadap keberadaan partai lokal di Aceh.
2. Untuk mengetahui apa janji kontribusi terhadap pihak Tionghoa dari pihak parlok.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber ide atau gagasan pemikiran bagi peneliti lain sebagai tambahan referensi khususnya bagi mahasiswa ilmu politik lainnya yang ingin meneliti tentang *persepsi masyarakat Tionghoa terhadap partai politik lokal di Aceh*.

#### 1.4.2 Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkecimpung dalam partai politik untuk menyuarakan kelompok minoritas terutama partai lokal di Aceh.

#### 1.5 Kajian Pustaka

Sebagai bahan rujukan, peneliti mengambil beberapa tulisan dari penelitian terdahulu untuk menjadi bahan pertimbangan, diantaranya:

Pertama, Dian Arisetya dalam tulisannya yang berjudul *Persepsi Etnis Tionghoa Sebagai Kelompok Minoritas Terhadap Non-Tionghoa Dalam Politik Multikulturalisme* mengatakan bahwa Persepsi etnis Tionghoa erat hubungannya dengan sikap ataupun perilaku yang berkaitan dengan diri mereka dan kelompok lain. Persepsi etnis Tionghoa terhadap etnis non-Tionghoa maksudnya adalah anggapan atau sikap etnis Tionghoa menilai diri mereka terutama pada posisi atau kedudukannya sebagai kelompok minoritas dan cara pandang mayoritas etnis non-Tionghoa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi etnis Tionghoa sebagai kelompok minoritas terhadap etnis non-Tionghoa dalam konsep politik kewarganegaraan multikultural di Kelurahan Metro. Hasil penelitian didasarkan pada teori Kymlicka tentang studi minority group, suatu tinjauan tentang etnis Tionghoa peranakan di Indonesia mengatakan bahwa ada perbedaan budaya antara penduduk asli Indonesia dan keturunan Tionghoa.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Dian Arisetya 2015. *Persepsi Etnis Tionghoa Sebagai Kelompok Minoritas Terhadap Non-Tionghoa Dalam Politik Multikulturalisme*, FISIP Universitas Lampung, Bandar Lampung

Tulisan di atas memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, dimana sama-sama membahas akan persepsi etnis Tionghoa. Perbedaannya, tulisan tersebut berfokus pada konsep politik kewarganegaraan multikultural, sedangkan penelitian ini mengacu kepada pandangan terhadap partai politik lokal.

Kedua, Patricia Sartika dalam tulisannya Partisipasi Pemilih Etnis Tionghoa Di Kelurahan Tawang Mas Dalam Pemilu Walikota Dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015 memaparkan bahwa Faktor internal yang menyebabkan partisipasi pemilih etnis Tionghoa rendah adalah apatisme, kejenuhan terhadap Pemilu, dan kesibukan sehari-hari. Sedangkan faktor eksternalnya adalah tidak terealisasinya program pemerintah dan kurangnya sosialisasi di Perumahan. Budaya Politik masyarakat etnis Tionghoa adalah budaya politik subjekpartisipan karena masih didominasi oleh masyarakat yang pasif walaupun ada sebagian kecil masyarakat yang aktif, dan juga rata-rata masyarakat memiliki tingkat sosial ekonomi yang sudah baik. Perilaku memilih masyarakat etnis Tionghoa di Perumahan Semarang Indah dan Puri anjasmoro adalah karena faktor pengalaman dan kepribadian calon Walikota dan partai pendukungnya yaitu PDI-P.

Perilaku memilih masyarakat etnis Tionghoa dapat dianalisis menggunakan pendekatan sosiologis dan psikologis. Sedangkan motif mereka untuk memilih adalah afektual-emosional. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah rendahnya partisipasi etnis Tionghoa di Kelurahan Tawang Mas disebabkan oleh:

1) Ketidaktertarikan masyarakat terhadap Pilwakot; 2) Kejenuhan masyarakat; 3) dan Kurangnya sosialisasi Pemilu. Faktor internal yang menyebabkan rendahnya partisipasi etnis Tionghoa di Kelurahan Tawangmas pada Pilwakot Semarang yaitu: 1) Apatisme; 2) Kejenuhan terhadap Pemilu; 3) dan Kesibukan sehari-hari<sup>8</sup>.

Tulisan di atas memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, dimana menggunakan subjek yang sama yakni masyarakat Tionghoa. Perbedaannya dalam penelitian tersebut masyarakat tionghoa sebagai partisipan, sedangkan dalam penelitian ini melihat dari segi sisi persepsi masyarakat Tionghoa itu sendiri.

Ketiga, skripsi oleh Agung Suharyanto, yang berjudul Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah, Partisipasi Politik merupakan tindakan suka rela yang berhasil ataupun gagal, yang akan terorganisir maupun tidak, kadang-kadang atau terus menerus, menggunakan cara yang sah ataupun tidak sah untuk mempengaruhi pilihan-pilihan kebijakan pemerintah, penyelenggaraan pemerintah atau pemilihan para pemimpin politik dan pemerintah pada tingkat nasional, daerah atau lokal. Partisipasi politik pada dasarnya merupakan bagian dari budaya politik, karena keberadaan struktur-struktur politik di dalam masyarakat, seperti partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan dan media masa yang kritis dan aktif Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, angket, dan wawancara. Data yang diperoleh dalam penelitian dianalisis dengan metode analisis deskriptif, kemudian

---

<sup>8</sup>Patricia Sartika 2017 *Partisipasi Pemilih Etnis Tionghoa Di Kelurahan Tawang Mas Dalam Pemilu Walikota Dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015* Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro 2017

dianalisis dengan tabel frekuensi. Berdasarkan hasil analisa dari observasi, penyebaran angket dan wawancara<sup>9</sup>.

Persamaan penelitian diatas mengenai partisipasi masyarakat Tionghoa dimana Partisipasi Politik merupakan tindakan suka rela yang berhasil ataupun gagal untuk mempengaruhi pilihan-pilihan kebijakan pemerintah. Sedangkan penelitian ini melihat persepsi masyarakat Tionghoa secara khusus terhadap partai politik lokal Aceh.

Keempat, Marina Syva Pratiwi, dalam sriksinya yang berjudul Partisipasi Politik Etnis Tionghoa Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 Intensitas partisipasi politik etnis Tionghoa dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Pringsewu tahun 2017 tidak tergolong kedalam kategori aktivis, karena tidak ada masyarakat etnis Tionghoa yang mencalonkan diri dalam pilkada kemarin dengan alasan bahwa dibutuhkannya pengetahuan yang baik tentang berbagai bidang agar dapat mencalonkan diri dan juga adanya anggapan bahwa politik itu adalah sesuatu yang kejam, selanjutnya intensitas partisipasi politik etnis Tionghoa juga tidak tergolong kedalam kategori partisipan, karena belum ditemukannya masyarakat etnis Tionghoa yang menjadi juru kampanye salah satu pasangan calon ataupun aktif di dalam parpol. Adapun peneliti menemukan masyarakat Tionghoa yang aktif di dalam suatu komunitas namun tidak dapat digolongkan kedalam kategori partisipan dikarenakan komunitas tersebut tidak

---

<sup>9</sup>Agung Suharyanto, *Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah*, Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, Indonesia

ada kaitannya dengan politik maupun pilkada Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif<sup>10</sup>.

Tulisan di atas memaparkan persamaan dengan memfokuskan subjek pada masyarakat Tionghoa, sedangkan perbedaannya ialah, dimana melihat intensitas partisipasi masyarakat Tionghoa yang tergolong kedalam partisipan. Yang mana didalam penelitian peneliti membahas persepsi masyarakat Tionghoa.

Kelima, dalam tulisannya Wiwiek Rukmi Dwi Astuti Peran Serta Etnis Tionghoa dalam Politik Indonesia Pasca Reformasi Sejak reformasi 1998 bergulir, etnis Tionghoa pun mulai berani bangkit menyatakan “jatidirinya” setelah lebih tiga dasawarsa mengalami berbagai perlakuan diskriminatif, melalui Keputusan Presiden No. 6/2000, Etnis Tionghoa di Indonesia memiliki kebebasan dalam mempraktekkan budaya Tionghoa dan berperan serta dalam politik nasional. Peran serta etnis Tionghoa dalam politik nasional terlihat dalam keikutsertaan mereka dalam berbagai organisasi sosial politik di tingkat lokal maupun nasional. Namun dua puluh tahun setelah reformasi, perubahan dalam politik dan ekonomi nasional memberikan dampak bagi peran serta politik etnis Tionghoa. Oleh karena itu, fokus dari tulisan ini adalah memaparkan peran serta etnis Tionghoa dalam politik nasional dan perubahannya terutama pasca reformasi. Tujuan dari penelitian adalah menjelaskan perubahan peran serta etnis Tionghoa dalam politik nasional. peran

---

<sup>10</sup>Marina Syva Pratiwi, *Partisipasi Politik Etnis Tionghoa Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017*, Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung

serta etnis Tionghoa semakin meningkat dan memiliki kebebasan untuk menyalurkan hak politiknya ke berbagai organisasi kemasyarakatan.<sup>11</sup>

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas perihal masyarakat Tionghoa dalam perpolitik. perbedaannya jika dalam tulisan di atas memaparkan peran serta etnis Tionghoa dalam kancah politik nasional, sementara penelitian peneliti Sebatas kancah politik lokal.

Dari beberapa tulisan diatas yang telah peneliti rangkum sebagai referensi, terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian penulis sehingga tidak ditemukan adanya tulisan tentang persepsi masyarakat Tionghoa Terhadap Keberadaan Partai Politik Lokal di Aceh. Oleh karna itu, penulis tertarik untuk menggali informasi serta sebagai tambahan ilmu pengetahuan dengan melakukan penelitian mengenai persepsi masyarakat Tionghoa terhadap keberadaan partai lokal di Aceh.

---

<sup>11</sup>Wiwiek Rukmi Dwi Astuti *Peran Serta Etnis Tionghoa dalam Politik Indonesia Pasca Refomasi*

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Penjelasan Istilah

##### 2.1.1 Masyarakat Tionghoa

Sistem masyarakat terdapat beberapa individu maupun kelompok yang berbeda, baik dari segi agama, ras, bahasa, dan etnis. Keberagaman masyarakat tersebut dapat tercermin dalam kehidupan bangsa ini. Indonesia sebagai negara multikultural yang didalamnya terdapat berbagai kehidupan manusia yang sarat akan adanya suatu perbedaan akan menciptakan sebuah harmonisasi kultural yang beragam. Negara yang sebagian wilayahnya terpisah-pisah,

Indonesia mampu menunjukkan bahwa masyarakatnya mampu menjaga suatu keberagaman dan tetap selalu menjunjung tinggi persatuan seperti yang telah tercantum dalam sila ketiga Pancasila yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia, juga terkenal dengan negara multi-etnis.<sup>12</sup>

Menurut Kong Yuanzhi, kontak antara penduduk Cina dan Kepulauan Nusantara (Indonesia) sudah terjadi sejak zaman dinasti Tang, dinasti Ming, dan dinasti Qing.<sup>13</sup> Pada masa dinasti Tang, daerah Cina bagian selatan ini merupakan daerah yang ramai dalam bidang perdagangan. Sehingga mendorong mereka untuk melakukan pelayaran dagang dan mencari kehidupan yang baru. Pada Dinasti Tang ini orang-orang Tionghoa mulai berdatangan ke Indonesia,

---

<sup>12</sup>Ety Gustin Merdeka Waty, 2016 *Orientasi Politik Etnis Tionghoa Di Kota Makassar*, Hlm 1

<sup>13</sup>Kong Yuanzhi, *Merangkul Cina : Hubungan Cina Indonesia Pasca Soeharto*, Jakarta: Gramedia Pustaka, (2009), hlm. 24.

puncaknya pada abad XIX dan permulaan abad XX merupakan migrasi besar-besaran bagi orang-orang Tionghoa ke seluruh dunia.<sup>14</sup>

Menurut Benny G. Setiono, sekitar pada abad 14 di Jakarta (dulu Sunda Kelapa) telah ditemukan penduduk dengan bermata rata-rata sipit dan berkulit putih. Dan pada abad XVI terjadi migrasi besar-besaran ke daerah Jawa. Rata-rata alasan meninggalkan negeri mereka karena ekonomi dan perang yang terus terjadi.<sup>15</sup>

Pada masa Kolonial Belanda, orang-orang Tionghoa mendapatkan fasilitas yang baik, hal ini dijadikan oleh pemerintah kolonial untuk sebagai alasan mereka perantara dagang dengan penduduk pribumi. Orang-orang Tionghoa sendiri juga dianggap sebagai penghambat pribumi dalam bidang perdagangan. Dari sikap kurang bersahabat ini, muncul kekerasan yang tertuju kepada etnis Tionghoa. Sebagai contoh yaitu kejadian Perang Jawa 1825-1830 dan pembantaian orang-orang Tionghoa di Batavia tahun 1740.<sup>16</sup>

Kasus-kasus yang terjadi diatas merupakan sebagian contoh kejadian yang menimpa etnis Tionghoa khususnya pada zaman Kolonial Belanda. Terlepas dari itu semua, peran etnis Tionghoa juga tidak bisa dianggap enteng, mereka juga berperan dalam berbagai bidang. Contohnya, Tionghoa Hwee Koan yang didirikan tahun 1900 yaitu mendirikan sekolah-sekolah untuk memajukan dalam bidang

---

<sup>14</sup>Victor Purcell, *The Chinese in Southeast Asia*, Second Edition Oxford University Press, Kuala Lumpur, 1981, hlm. 465.

<sup>15</sup>Benny G. Setiono, *Tionghoa Dalam Pusaran Politik*, Elkasa: Jakarta, 2002, hlm. 31.

<sup>16</sup>Peter Carey, *Orang Jawa Dan Masyarakat Cina 1755-1825*, Jakarta: Pustaka Azet, 1986, hlm. 74.

pendidikan. Pada tahun 1934 sudah mencapai 450 sekolah. Selain di bidang pendidikan, etnis Tionghoa juga mengambil peran dalam bidang ekonomi di Indonesia, yaitu dengan mendirikan Siang Hwee (kamar dagang orang Tionghoa) tahun 1906 di Batavia. Peran Siang Hwee sendiri yaitu lebih menyerupai konsulat Cina saat konsul kerajaan tidak ada. Dalam hal ini, kekayaan merupakan hal sangat penting dalam pemilihan pemimpin Siang Hwee.<sup>17</sup>

Menurut penulis sendiri etnis Tionghoa merupakan mereka yang mampu berbicara dengan bahasa Mandarin dan mempunyai darah keturunan dari Tionghoa. Masyarakat Tionghoa sendiri dibagi menjadi dua yaitu peranakan dan totok. Peranakan sendiri maksudnya yaitu orang Tionghoa yang datang ke Jawa biasanya laki-laki kemudian mereka menikah dengan wanita setempat, baik yang beragama Islam maupun Islam nominal. Untuk tempat tinggal kaum peranakan dari generasi sebelum perang (perang dunia 2) itu terpusat di Jawa dan berbagai daerah di luar Jawa.<sup>18</sup>

Dapat ditambahkan pula, bahwa banyak Tionghoa peranakan memiliki ciri-ciri yang sulit dibedakan dengan penduduk pribumi. Dengan demikian, apabila kita mendefinisikan ras dalam bahasa umum mereka dapat dikatakan orang Indonesia. Jadi dalam kenyataannya Tionghoa peranakan disini pada umumnya

---

<sup>17</sup>Justian Suhandinata, SE, *WNI Keturunan Tionghoa Dalam Stabilitas Ekonomi Dan Politik Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, 2009, hlm. 36.

<sup>18</sup>Leo Suryadinata, *Dilema Minoritas Tionghoa*, Grafiti Pers, 1984, hlm. 86.

sama halnya dengan warga negara lainnya, karena perwakilan dari mereka sama seperti bahasanya, adatnya, banyak ciri yang serupa.<sup>19</sup>

Kaum totok merupakan pendatang baru yang tiba di Indonesia menjelang akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Hal itu terjadi pada saat terjadinya pergolakan politik di negeri Cina, bersamaan dengan itu adanya kenaikan permintaan tenaga manusia di negara-negara jajahan di Asia Tenggara. Kaum peranakan menyebut mereka dengan *singkeh* artinya tamu baru. Karena mereka lahir di luar negeri Indonesia (yaitu Negara Cina), orang Indonesia menyebutnya dengan totok, artinya orang berdarah murni asing. Logikanya kaum totok itu yang lahir di Negara asal mereka (Cina) dan kemudian datang ke Indonesia dan menetap. Rata-rata kaum totok berprofesi sebagai pedagang. Di luar Jawa banyak dari mereka yang bekerja di pertambangan dan perkebunan.

Dalam sebuah karya William G. Skinner, orang Tionghoa didefinisikan berdasarkan konsep identifikasi sosial yakni bertindak sebagai anggota dari dan mengidentifikasikan dirinya dengan masyarakat Tionghoa. Selain itu juga disebutkan pula satu-satunya ciri budaya yang dapat digunakan untuk menentukan ke-Tionghoan seseorang ialah dengan menggunakan nama Tionghoa.<sup>20</sup>

Definisi Skinner tersebut merupakan sebuah tolak ukur yang digunakan saat itu untuk mendefinisikan ke-Tionghoan seseorang, seperti tolak ukur yang menyatakan bahwa “Orang Tionghoa adalah imigran yang lahir di Tiongkok atau keturunan imigran yang datang terlebih dahulu melalui pihak laki-laki”. Bagi

---

<sup>19</sup> Leo Suryadinata, *Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia*, Pustaka LP3ES Indonesia, 2005, hlm. 261.

<sup>20</sup>William G. Skinner, *The Chinese Minority*, dalam Ruth T. McVey (ed), Indonesia (New Haven: Southeast Asia Study, Yale University, 1963) hlm 97.

Skinner, tolak ukur semacam ini tidaklah tepat karena kenyataannya tidak sesuai dengan yang ada di sosial masyarakat.

Pengertian pribumi adalah asli dan non pribumi adalah pendatang. Apabila pribumi dimengerti sebagai keaslian, susah sekali untuk mendeteksi ukuran keaslian. Apakah seorang yang lahir di Yogyakarta (Jawa) baik rakyat, priyayi atau keturunan raja adalah sungguh-sungguh asli tanpa ada darah campuran sejak awal mula. Padahal setiap orang akan datang dari suatu tempat dan berpindah dari tempat yang lain.<sup>21</sup>

Oleh sebab itu, mengenai keberadaan komunitas Tionghoa di Indonesia ini sebenarnya tidak lepas dari dampak runtuhnya Dinasti Sung<sup>14</sup> dan Dinasti Ming (1368-1644). Pada masa tersebut merupakan perkembangan pesat kaitannya dengan perdagangan antara Tiongkok dengan luar negeri termasuk juga Nusantara. Sebagai salah satu bukti mengenai kehidupan awal Tionghoa di Indonesia antara periode sebelum masehi hingga awal masehi dapat di jumpai melalui peninggalan-peninggalan di Situs Serpong, Rawa Kidang, Sugri, dan Kramat Tangerang.

Latar belakang keberadaan etnis Tionghoa di Nusantara dan bagaimana mereka berinteraksi dengan masyarakat pribumi penting untuk di bahas. Karena untuk dapat mengetahui bagaimana mereka menjalani di kehidupan selanjutnya di Indonesia, karena etnis Tionghoa menjadi salah satu sejarah perjalanan panjang yang menjadi polemik di Nusantara. Pada umumnya orang Cina di Indonesia kini

---

<sup>21</sup>Ons Untoro. (2000). *Cina, Jawa dan Pribumi*, Tembi, Vol. 1 No, 2, hlm. 3.

hidup di kota-kota yang merupakan keturunan dari perantuan yang datang pada abad ke-19.

Di Banda Aceh sendiri ada beberapa suku Cina yang hidup dan berkembang diantaranya suku Khek atau Hakka yang berasal dari provinsi kwantung (canton). Etnis cina yang ada di Banda Aceh adalah orang-orang Cina yang hidup selama 4 sampai 5 generasi. Dengan kata lain, etnis cina yang ada di Kota Banda Aceh merupakan Cina asli yang hidup dan bercampur dengan orang cina sendiri seperti suku Hok Kian, Hai Nan dan Konh Hu, dan suku Cina lainnya. Mereka mempunyai nenek moyang yang sama namun berbeda etnis, bahasa daerah, dan dialek. Etnis Cina di Banda Aceh hidup dan berkembang sebagaimana masyarakat nusantara yang lainnya. Hidup dan kehidupannya berkecimpung dalam bisnis. Sejarah kedatangannya, kehidupan dan hubungan etnis dengan masyarakat yang ada di kota Banda Aceh dapat dilihat dan ditelusuri dari asal mulanya kontak dengan orang Aceh, hubungan etnis Cina dengan etnis Aceh telah terjadi ratusan bahkan ribuan tahun lalu<sup>22</sup>.

Kota Banda Aceh merupakan salah satu daerah yang terletak di ujung pulau sumatra. Kota Banda Aceh sejak dulu dikenal dengan pusat perdagangan, administrasi dan pusat pemerintahan pada masa kerajaan Lambri dan kerajaan Aceh Darussalam, saat ini kota Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Sejak sebelum masehi di Kota Banda Aceh telah diduduki oleh penduduk yang berperadaban tinggi.

---

<sup>22</sup>A.Rani Usman, 2009, *Etnis Cina Perantuan di Aceh, Jakarta*. Yayasan Obor Indonesia

Mengenai hubungan Aceh dengan bangsa asing tercatat pada awal dinasti mongol di cina menunjukkan beberapa kerajaan di Sumatra seperti Samudra, Lamuri, Perelak, Tamiang Dan Haru. Tamiang dan Haru memang dipaksa oleh Mongol untuk mengirimkan upetinya. Kerajaan samudra mulai mengadakan hubungan dengan dinasti mongol pada tahun 1282. Pada tahun itu penguasa pasai menjalin hubungan dengan Cina melalui perutusan Cina yang kembali dari India Selatan dan singgah disamudra. Peristiwa ini dianggap sebagai permulaan kontak antara samudra (pasai) dengan Cina.<sup>23</sup>

Adanya hubungan Aceh dengan Cina pada abad ke-12 dan ke-13 tersebut,jika dianalisis hubungan antar etnis Aceh dengan etnis Cina telah terjadi kontak budaya yang di mulai dengan hubungan politik, peradaban dan dagang. Oleh karena itu hubungan antar etnis terjalin dengan adanya hubungan anatara kedua kerajaan yaitu kerajaan mongol,Cina dengan kerajaan Tamiang di Aceh Tamiang dan kerajaan Pasai di Aceh Utara. Di samping itu hubungan anatr budaya yang di bangun antara dua bangsa dapat mempengaruhi peradaban Aceh,Tamiang. Jika di analisis perkembangan pengaruh Cina di Asia pada saat itu,cukup kuat sekaligus peradaban Tionghoa sudah memainkan peran yang penting di Asia Tenggara, maka hubungan diplomasi yang di jalin oleh kerajaan pasai dan kerajaan Tamiang dengan bangsa Tionghoa merupakan langkah maju untuk menjaga eksistensinya di selat malaka. Oleh karena itu Pasai menjadi mitra perdagangan dengan bangsa Tionghoa.

---

<sup>23</sup>Ismail,Muhammad Gade.1997. *Edisi 2 Pasai Dalam Perjalanan Sejarah :Abad 13 sampai awal Abad ke 16* Jakarta : Departemen Pendidikan dan Budaya. Hlm 23

Hubungan diplomasi pada saat tersebut merupakan hal yang sangat menentukan dalam percaturan perdagangan internasional. Hubungan dengan bangsa asing dibina atas saling menguntungkan satu sama lain. Hubungan diplomasi antara Aceh dengan Tiongkok di bangun atas saling menguntungkan kedua belah pihak. Hubungan diplomasi yang di jalin sangat akrab sehingga raja Tiongkok menyerahkan cendramata yang di hadiahkan kepada raja Pasai yaitu lonceng crakradonya.<sup>24</sup>

Di samping itu hubungan Etnis Aceh dengan bangsa asing disebutkan ada perdagangan Siam sudah tercatat di pasai pada kira-kira tahun 1520. Hubungan dagang sangat boleh terus berlangsung secara teratur dengan Aceh yaitu hubungan diplomasi. Hikayat Aceh paragraf 124-223 menyebut adanya utusan dari Siam. Terkagum- kagum melihat ketrampilan pecagah yang muda itu ( yang kelak terkenal sebagai Iskandar Muda), para utusan pulang ke raja mereka yang telah mendengar laporan mereka, memanggil raja-raja dari “Kamboja, Ciangmai, Lanca, dan Paslula”, semakin pula utusan dari Cina dan Campa untuk menyampaikan kepada mereka adanya keajaiban itu<sup>25</sup>. Dari pembahasan di atas dapat kita rincikan melalui tabel 2.1 di bawah:

Tabel 2.1  
Model hubungan antara etnis Cina dan etnis Aceh

No	Fase hubungan	Model hubungan	Orientasi	Kepentingan
1.	Abad ke-13	Birokrasi	Politik	Antar bangsa
2.	Abad ke-15-18	Dagang	Bisnis	Pribadi/individu

<sup>24</sup>Yuanzhi, kong.2000. *muslim Tionghoa, cheng Ho*. jakarta :pustaka populer obor hlm 98

<sup>25</sup>Lombart, denys.1991, *kerajaan aceh jaman sultan iskandar muda (1607-1636)*, jakarta: balai pustaka.

3.	Abad ke-19	Kontrak kerja	Menciptakan lapangan kerja	Buruh
----	------------	---------------	----------------------------	-------

Jika di analisis hubungan antar etnis Cina dan Aceh sudah menjadi ratusan tahun dan hubungan tersebut sebenarnya terbina atas kerjasama secara resmi antara dua kekuasaan. Jika dilihat bangsa Tionghoa sebagai bangsa besar sekaligus peradaban ilmu pengetahuan yang maju, maka bangsa Cina memerlukan dukungan dan hubungan dengan bangsa lain terutama di Asia tenggara. Demikian juga Aceh saat itu merupakan suatu wilayah yang strategis di nusantara terutama di Semenanjung Melayu, juga membutuhkan bantuan dari dunia luar terutama dalam menjaga eksistensinya di malaka. Hubungan tersebut suatu kebutuhan yang di bentuk guna saling menjaga dan mengakui kedaulatan masing-masing.<sup>26</sup>

Demikian halnya bagi umat islam negeri Cina. Cina merupakan negeri yang tidak asing lagi, terutama daerah xinjiang. Eksistensi negeri tirai bambu ini tercatat dalam sebuah hadist Rasulullah saw yang amat terkenal, Tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Di masa awal peradaban Islam, Cina adalah super power, pemilik semua teknologi dan ilmu pengetahuan peradaban tinggi, serta wilayah yang maha luas.<sup>27</sup>

<sup>26</sup>A.Rani Usman, 2009, *Etnis Cina Perantauan di Aceh, Jakarta*. Yayasan Obor Indonesia. Hlm 147

<sup>27</sup>Setiawan, Teguh, Wardani, Sri Budi Eko (Ed) 2003, *Muslim Di Amerika Dan Cina, Perjuangan Merengkuh Identitas*. Jakarta: Republika

## 2.1.2 Etnis Tionghoa

Etnisitas sering kali didefinisikan sebagai perasaan terhadap identitas etnis yang dimiliki oleh masing-masing individu dalam kelompok secara subjektif dan simbolik untuk menghasilkan keterikatan dari dalam dan menjadi pembeda dengan kelompok-kelompok lainnya.

Identitas etnis dikategorikan oleh masing-masing kelompok berdasarkan hubungan keluarga, kebudayaan, ras, agama dan asal daerah, menjelaskan bahwa Identitas etnis baik secara kelompok maupun individu dibangun atas dasar Subjektivitas (pengalaman) dan Objektivitas (kesejarahan).

Berbagai etnis yang tinggal dan menetap di Indonesia beberapa diantaranya merupakan etnis pendatang salah satunya adalah etnis yang berasal dari Cina yang kemudian dikenal sebagai etnis Tionghoa, dari beberapa etnis pendatang yang cukup banyak terlihat membaaur dalam struktur masyarakat Indonesia adalah Etnis Tionghoa.

## 2.2 Teori

### 2.2.1 Teori Persepsi

Persepsi merupakan pengalaman tentang obyek peristiwa, atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi itu didasarkan pada gerakan orang pada petunjuk kinesik. Perilaku individu seringkali didasarkan pada persepsi mereka tentang kenyataan, bukan pada kenyataan itu sendiri. Jadi persepsi dapat dikatakan sebagai suatu tanggapan yang

diterima oleh panca indera dan diapresiasi melalui kesan ataupun pesan dalam kenyataan.<sup>28</sup> .

persepsi juga merupakan suatu proses yang diterima panca indera yang kemudian diorganisasikan dan diinterpretasikan sehingga individu menyadari yang diinderanya itu. persepsi timbul karena adanya respon terhadap stimulus. Stimulus yang diterima seseorang sangat kompleks, stimulus masuk ke dalam otak, kemudian diartikan, ditafsirkan serta diberi makna melalui proses yang rumit baru kemudian dihasilkan persepsi

Stimulus mana yang akan mendapatkan respon dari individu tergantung pada perhatian individu yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut, perasaan, kemampuan berfikir, pengalaman-pengalaman yang dimiliki individu tidak sama, maka dalam mempersepsi sesuatu stimulus, hasil persepsi mungkin akan berbeda antar individu satu dengan individu lain. Setiap orang mempunyai kecenderungan dalam melihat benda yang sama dengan cara yang berbeda beda. Perbedaan tersebut bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah pengetahuan, pengalaman dan sudut pandangnya. Berdasarkan pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dengan persepsi adalah tanggapan tentang suatu oyek peristiwa yang diperoleh dengan menyimpulkan dan menafsirkan pesan. Persepsi merupakan suatu proses yang dimulai dari penglihatan hingga terbentuk

---

<sup>28</sup>Rakhmat, Jalaluddin. 2004. Psikologi Komunikasi. Remaja Rosdakarya. Bandung hlm 51

tanggapan yang terjadi dalam diri individu sehingga individu sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya<sup>29</sup>.

Persepsi merupakan pengalaman tentang obyek peristiwa, atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi itu didasarkan pada gerakan orang pada petunjuk kinesik. Perilaku individu seringkali didasarkan pada persepsi mereka tentang kenyataan, bukan pada kenyataan itu sendiri. Jadi persepsi dapat dikatakan sebagai suatu tanggapan yang diterima oleh panca indera dan diapresiasi melalui kesan ataupun pesan dalam kenyataan<sup>30</sup>.

#### 2.2.2 Type-Type Persepsi

Persepsi merupakan pandangan seseorang terhadap sesuatu yang mana hal tersebut memicu respon terhadap di sekitarnya. Persepsi manusia tidak selamanya sama tergantung dari sudut pandang mana mereka ingin melihat objek. Ada beberapa faktor yang mampu mempengaruhi persepsi diantaranya, jika dilihat dari faktor internal yaitu meliputi perasaan, sikap, kepribadian dan prasangka. Dan dari segi eksternal meliputi latar belakang keluarga, informasi yang di peroleh serta hal-hal baru dan familiar atau ketidak asingan suatu objek<sup>31</sup>. Dalam hal ini persepsi di bagi dua bagian sebagai berikut :

---

<sup>29</sup>Abdillah, Ubed. *Politik Identitas Etnis. Pergulatan Tanda Tanpa Identitas*. Magelang: IndonesiaTera, 2002.Hlm

<sup>30</sup>Rakhmat,jalaluddin.2004. *psikologi komunikasi.remaja rosdakarya*. Bandung.Hlm 51

<sup>31</sup>Miftah, toha. (2003). *Perilaku organisasi konsep dasar aplikasinya*. Jakarta: PT raja grafindo persada.

a. Persepsi terhadap obyek (lingkungan fisik); sifat-sifat luar, sedangkan persepsi terhadap orang menanggapi sifat-sifat luar dan dalam (perasaan, motif, harapan, dan sebagainya). Orang akan mempersepsi anda pada saat anda mempersepsi mereka. Dengan kata lain, persepsi terhadap manusia bersifat interaktif.

b. Persepsi terhadap manusia; melalui lambang-lambang fisik, sedangkan persepsi terhadap orang melalui lambing-lambang verbal dan nonverbal. Orang lebih aktif daripada kebanyakan obyek dan lebih sulit diramalkan<sup>32</sup>.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya persepsi, sebagai berikut yaitu:

a. Faktor-faktor fungsional

Faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal-hal lain yang termasuk apa yang disebut sebagai faktor-faktor personal. Krech dan Crutchfield merumuskan dalil persepsi bersifat selektif secara fungsional. Dalil ini berarti bahwa obyek-obyek yang mendapat tekanan dalam persepsi biasanya obyek-obyek yang memenuhi tujuan individu yang melakukan persepsi.

---

<sup>32</sup>Deddy Mulyana. (2005). Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,171.

b. Faktor-faktor struktural Faktor-faktor struktural yang menentukan persepsi berasal dari luar individu, seperti lingkungan, budaya, hukum yang berlaku, nilai-nilai dalam masyarakat sangat berpengaruh terhadap seseorang dalam mempersepsikan sesuatu Persepsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemberian arti masyarakat pengguna layanan tentang kualitas pelayanan pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Dimana sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat<sup>33</sup>.

### **2.2.3 Teori persepsi dalam perspektif politik dan budaya**

#### **2.2.3.1 Politik Dan Budaya**

Dilihat dari sisi etimologi, kata politik berasal dari bahasa Yunani, yakni polis yang berarti kota yang berstatus negara kota (city state). Dalam negarakota di zaman Yunani, orang saling berinteraksi guna mencapai kesejahteraan (kebaikan, menurut Aristoteles) dalam hidupnya. Filsuf seperti Plato dan Aristoteles menganggap politics sebagai suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik (polity) yang terbaik<sup>34</sup>.

---

<sup>33</sup>Jalaluddin Rahmat, 2011 Psikologi Komunikasi. Bandung PT Remaja Rosdakarya, Hlm 54

<sup>34</sup>Budiardjo Miriam. 2007. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm 14.

Tentu dalam menciptakan masyarakat politik yang baik mestilah didasari oleh norma-norma, sehingga akan relevan dengan apa yang di niatkan dan terciptanya kondisi politik yang di dasari oleh aturan-aturan. Suatu kebudayaan akan mampu mempengaruhi perspektif politik baik bagi perseorangan maupun kelompok.

“kebudayaan” sendiri berasal dari kata sansekerta yaitu buddhayah bentuk jamak dari buddhi yang berarti budi atau akal, sehingga menurutnya kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal, ada juga yang berpendapat sebagai suatu perkembangan dari majemuk budi- daya yang artinya daya dari budi atau kekuatan dari akal<sup>35</sup>.

persepsi merupakan pengamatan seseorang yang berasal dari komponen kognisinya. Aspek kognisi merupakan aspek penggerak perubahan karena informasi yang diterima akan menentukan perasaan dan kemauan untuk berbuat. Jadi komponen kognisi akan berpengaruh terhadap prediposisi seseorang untuk bertindak senang atau tidak senang terhadap suatu, yang merupakan jawaban atas pertanyaan apa yang dipikirkan atau dipersepsi tentang tersebut<sup>36</sup>.

Jadi persepsi dalam perspektif politik dan budaya dapat disimpulkan sebagai tanggapan atau pengetahuan sebagai suatu tujuan

---

<sup>35</sup>Koentjaraningrat, Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hal 9.

<sup>36</sup>Mar'at, 1991. Sikap manusia perubahan dan pengukurannya. Jakarta : ghalia indonesia, hlm 22-23

untuk mencapai masyarakat politik yang baik dalam bermasyarakat dengan didasari hal- hal yang bersangkutan dengan budi dan akal, sehingga terciptanya pandangan yang berbasiskan norma norma.

#### 2.2.4 Politik Identitas

Agnes Heller menggambarkan terkait politik identitas dalam hal ini sebagai politik, yang difokuskan pada suatu pembedaan, dimana sebagai kategori utamanya adalah menjanjikan kebebasan, toleransi, dan kebebasan bermain (free play) walaupun pada akhirnya akan memunculkan pola-pola intoleransi, kekerasan dan pertentangan etnis. Pada akhirnya politik identitas juga dapat mencakup rasisme, bio-feminisme, environmentalisme (politik isu lingkungan), dan perselisihan etnis.<sup>37</sup>

Dalam tulisannya Rahmadhanti Firmaningsih mengatakan bahwa pandangan peter tentang bagaimana suatu individu membentuk identitasnya. Dimana identitas tersebut memiliki kaitanya dengan politik secara lebih jauh<sup>38</sup> Begitupun dalam filsafat kontemporer, di katakan bahwa setidaknya politik memiliki dua kategori diantaranya:

- a. Redistribusi, dimana setiap orang menginginkan pembagian sumber daya alam secara adil dan merata

---

<sup>37</sup>Abdillah, Ubed. *Politik Identitas Etnis. Pergulatan Tanda Tanpa Identitas*. Magelang: IndonesiaTera, 2002.Hlm 22

<sup>38</sup>Peter J.Burke.J,E 2009.*Identity Theory*.New York:Oxford University Press.

- b. Rekognisi, dimana kondisi setiap orang menginginkan masyarakat yang ramah terhadap perbedaan.

Dalam artian, masyarakat harus ditata sehingga minoritas tidak harus melebur dalam kultur mayoritas.<sup>39</sup> Dalam hal ini bahasan terkait nasionalisme dalam perspektif antropologi, sebagaimana yang dikutip dalam Gellner, bahwa nasionalisme didefinisikan sebagai sebuah ideologi yang beranggapan bahwa tapal-tapal batas budaya mesti bersepadanan dengan tapal-tapal batas politik, artinya bahwa negara harus mencakup hanya orang yang “berjenis sama”. Nasionalisme muncul sebagai akibat dari tanggapan terhadap industrialisasi dan keterceraian orang-orang dari rupa-rupa ikatan primordial kepada kekerabatan, agama dan komunitas lokal. Dalam catatan sejarah Indonesia dikatakan, bahwa peran ideologi nasionalisme dalam politik di Indonesia, dimulai oleh sekelompok pemuda yang tergabung dalam organisasi Budi Utomo<sup>40</sup>.

Melalui Organisasi inilah kemudian dipandang sebagai lambang kelahiran kesadaran nasionalisme di antara kaum pribumi dengan mencetuskan “Sumpah Pemuda” sebagai suatu komitmen politik mengaspirasikan semangat nasionalisme mereka. Politik Identitas di Indonesia, sebagaimana dikutip dari Ma’arif dalam bukunya *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Indonesia*”, menjelaskan bahwa khususnya di Indonesia, politik Identitas lebih terkait dengan etnisitas,

---

<sup>39</sup>Spinner-halev,j.2009 multikulturalism and its critics.oxford:oxford handbooks online.

<sup>40</sup>Ernest gellner,1983,nations and nationalism, Oxford :basil blackwell

agama, ideologi dan kepentingan-kepentingan lokal yang diwakili umumnya oleh para elit politik dengan artikulasinya masing-masing<sup>41</sup>

Identitas merupakan sebuah batas yang kuat untuk mengevaluasi kehadiran diri kita dengan orang lain. Menurut Camen dan Champion dalam Liliweri mengatakan bahwa “ identitas diri suatu etnik adalah integrasi dari etnisitas dan perasaan kesamaan ras dalam suatu konsep diri. Setiap individu memiliki identitas personal mulai dari jenis kelamin, warna suara, gaya bicara, tipe wajah hingga status perkawinan, jumlah anak, tingkat pendidikan dan tempat tinggal. Champion juga mengemukakan bahwa bahasa merupakan identitas utama suatu kelompok etnik<sup>42</sup>

Identitas meliputi tiga bentuk yaitu: identitas pribadi, identitas sosial, dan identitas budaya. Identitas personal didasarkan pada keunikan karakteristik pribadi seseorang. Identitas sosial merupakan identitas yang diperoleh melalui proses pencarian dan pendidikan dalam jangka waktu lama.

Identitas budaya merupakan ciri yang ditunjukkan seseorang karena merupakan anggota dari sebuah kelompok etnik tertentu. Sedangkan secara sederhana identitas budaya adalah rincian karakteristik atau ciri-ciri sebuah kebudayaan yang dimiliki oleh sekelompok orang yang diketahui batas-batasnya, tatkala dibandingkan dengan karakteristik atau ciri-ciri kebudayaan orang lain.

Menurut Kenneth, identitas budaya sangat tergantung pada bahasa<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Maarif, Ahmad Syafii. *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*, Jakarta, Democracy Project, 2012. Hlm 55

<sup>42</sup> Liliweri, Alo. 2005. *Prasangka dan Konflik*. LKIS. Yogyakarta. Hlm.35

<sup>43</sup> Liliweri, Alo. 2005. *Prasangka dan Konflik*. LKIS. Yogyakarta. hlm 42

Dikatakan bahwa para Pemikir seperti Ania Loomba, Homi K. Bhabha dan Gayatri C Spivak adalah nama-nama yang mendalami hal tersebut. Kontribusi mereka dalam hal ini adalah telah meletakkan politik identitas sebagai ciptaan dalam wacana sejarah dan budaya. Sedangkan dalam literatur ilmu politik, politik identitas betul-betul dipilah, sehingga terlihat perbedaan yang jelas tentang apa itu politik identitas (*political of Identity*) dan apa itu identitas politik (*political identity*). Identitas politik (*Political identity*) merupakan sebuah konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek, di dalam ikatan suatu komunitas politik.

Adapun politik Identitas (*political of identity*) akan mengacu pada mekanisme politik pengorganisasian identitas, baik itu dalam identitas politik maupun identitas sosial yang menjadi sumber dan sarana politik. Sangat dipahami bahwa politik identitas sebagai sumber dan sarana politik dalam pertarungan perebutan kekuasaan politik kian terlihat dalam praktek politik kekinian. Apalagi menjelang pesta demokrasi akbar yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 di Indonesia melalui agenda besar bernama PEMILU saat ini. Sebenarnya Donald L Morowitz (1998), salah satu pakar politik dari universitas Duke telah mendefinisikan politik identitas sebagai pemberian garis yang sangat tegas untuk menentukan siapa yang akan disertakan dan siapa yang akan ditolak. Garis penentuan tersebut tentu akan tampak tidak dapat dirubah.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup>Setyaningrum, Arie."Memetakan lokasi bagi politik identitas dalam wacana politik poskolonial dalam "Politik perlawanan" Yogyakarta: IRE, 2005.Hlm 19

Karena itu maka status baik sebagai anggota dan bukan anggota akan terlihat bersifat permanen. Sedangkan para ilmuwan yang bergelut dalam wacana politik identitas lainnyapun, telah mencoba menafsirkan kembali dalam logika yang sangat sederhana dan lebih operasional. Sebut saja Agnes Heller misalnya, yang telah mendefinisikan politik identitas adalah sebagai sebuah gerakan politik yang fokus perhatiannya adalah pada suatu perbedaan sebagai suatu kategori politik yang utama. Etnis Cina yang hidup dan berkembang di Nanggroe Aceh Darussalam mempunyai identitas kecinaan mereka. Etnis Cina yang ada di Banda Aceh sebagian besar adalah etnis Khek. Etnis Cina suku Khek mempunyai identitas budaya lokal mereka yaitu identitas bahasa daerah asal. Identitas daerah asal sebagai dijemakan secara terbuka sesama etnis mereka. Masyarakat Cina yang ada di Banda Aceh adalah suku Khek.

Khek menurut bahasa Aceh adalah kualitas rendah. Atau dengan kata lain, Khek dalam bahasa Aceh adalah rendah atau rendahan. Jika dilihat dari sejarah, pada awalnya kedatangan etnis Cina ke Banda Aceh adalah sebagai buruh dan pekerja bangunan, dan mereka semula dianggap sebagai orang rendahan. Khek menurut bahasa mandarin adalah Tamu. Artinya, suku Khek merupakan suku pendatang dari suku-suku yang ada di antara suku-suku di Cina. Jika dilihat dari bahasa yang digunakan adalah sangat bertolak belakang artinya. Namun demikian antara Khek bahasa mandarin dan Khek bahasa Aceh sebenarnya tidak ada hubungan sama sekali. Namun demikian kata-kata tersebut telah digunakan oleh kedua suku bangsa yang ada di Banda Aceh, dan kata-kata tersebut diartikan

sesuai dengan budaya mereka masing-masing sehingga tidak menimbulkan kesenjangan makna dalam masyarakat.<sup>45</sup>

Dalam pergaulan masyarakat di manapun mereka berbeda identitas merupakan ciri dari budaya,etnis,dan bangsa. Identitas muncul ketika orang orang berkomunikasi di antara masyarakat yang berbeda budaya. Identitas adalah belonging tentang persamaan dengan sejumlah orang dan tentang apa yang membedakan kamu dengan yang lainnya. Sebagai suatu yang paling mendasar,identitas memberi kamu rasa tentang lokasi pribadi, inti yang stabil bagi individualitas kamu.<sup>46</sup>

Identitas lokal dan nasional bagi etnis Cina yang ada di Banda Aceh di cerminkan dari lembaga pemerintahan atau lembaga masyarakat lainnya. Identitas nasional mereka tunjukan jika pergi keluar negeri dengan memperlihatkan paspor sedangkan identitas lokal dengan menunjukan kartu penduduk. Identitas budaya indonesia mereka tunjukan dengan berbicara dalam bahasa Indonesia dan menyebut dirinya warga negara Indonesia atau daerah asal mereka. Identitas lokal juga tercermin dari bahasa daerah dengan bahasa serta di pengaruhi oleh budaya lokal. Identitas lokal tercermin dari gaya bahasa atau dialeg yang mereka pakai serta perilaku budaya lokal. Etnis cina yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh sedikitnya mempengaruhi dan mengadopsi budaya lokal tersebut pada etnis Cina perantauan.

---

<sup>45</sup>A Rani Usman,2009,*Etnis Cina perantauan di Aceh,jakarta,yayasan obor indonesia* hlm.329

<sup>46</sup>Wibowo ,2000,*berkaca dari pengalamanrepublik rakyat Cina negara dan masyarakatnya.jakarta:gramedika pustaka utama* hlm.171

Bahasa lokal digunakan oleh etnis cina di Banda Aceh seperti aksen bahasa yang terkesan terbuka dan kasar. Disamping itu hubungan dengan sesama etnis mereka juga dipengaruhi oleh tradisi dan kebiasaan dimana mereka hidup. Namun demikian identitas nasional dan lokal selain mengikuti alur politik sekaligus mengikuti institusi masyarakat dan lingkungan mereka.

Etnis Cina di Banda Aceh mereka umumnya mempunyai identitas ganda seperti identitas nasional/lokal. Indonesia sekaligus mempunyai identitas budaya mereka. Fenomena tersebut dapat ditelusuri, hampir semua etnis Cina di Banda Aceh mempunyai dua nama yaitu nama keluarga dan nama nasional.<sup>47</sup>

#### 2.2.5 Peluang Politik Minoritas

Kelompok minoritas menjadi etnisitas sosial yang tak dapat dinafikan keberadaannya. Hampir di tiap negara, kehadiran minoritas jadi semacam keniscayaan yang tak terbantahkan di tengah hegemoni kelompok mayoritas. Keminoritasan jamak dimaknai karena keberbedaan dari yang mayoritas atas dasar identitas, baik agama, bahasa, etnis, budaya. Jumlahnya pun biasanya tak banyak bila dibandingkan dengan penduduk di suatu negara. Oleh karenanya, ia berada pada posisi yang tidak dominan. Posisi yang subordinat ini membuat hubungan solidaritas antar anggotanya amat kuat guna mempertahankan identitas mereka. Pelebelan kelompok minoritas merupakan imbas dari menguatnya politik identitas. Politik identitas berakar pada primordialisme. Primordialisme, mengikuti konsep polity Aristoteles, berarti “berperang ke luar” dan “konsolidasi

---

<sup>47</sup>A Rani Usman, 2009, *Etnis Cina Perantauan Di Aceh*, Jakarta Yayasan Obor Indonesia Hlm 330-336

ke dalam”. Karena itu, politik identitas selalu merayakan konflik baik bersifat vis-à-vis maupun dialektik. Merayakan konflik berarti mendefinisi Diri (Self) sebagai Yang Sama dan Yang Lain. Yang Sama selalu bermakna mayor, sementara Yang Lain selalu bermakna minor. Itulah watak superior. Tetapi bisa juga sebaliknya, dan itulah watak inferior. Politik identitas selalu berada di rentang ketegangan antara superior dan inferior, antara Yang Sama dan Yang Lain, antara mayoritas dan minoritas. Politik identitas seolah menemukan kekuatannya dalam politik teori pluralisme. Dalam politik teori pluralisme, keberadaan minoritas berubah dari didiamkan dan dinafikan menjadi dipertanyakan sekaligus diperjuangkan.<sup>48</sup>

Graham C. Lincoln mendefinisi kelompok minoritas sebagai kelompok yang dianggap oleh elit-elit sebagai berbeda dan/atau inferior atas dasar karakteristik tertentu dan sebagai konsekuensi diperlakukan secara negatif.<sup>49</sup> Yap Thiam Hien mengatakan, minoritas tidak ditentukan jumlah, tapi perlakuan yang menentukan status minoritas.<sup>50</sup>

### 2.2.6 Partai Lokal

Partai politik lokal adalah partai yang jaringannya terbatas pada suatu daerah tertentu dan tidak mencangkup secara nasional, meskipun dapat berkompetensi pada level nasional. Lokalitas menjadi kata penting ketika

---

<sup>48</sup>Eddie Riyadi Terre, *Posisi Minoritas Dalam Pluralisme: Sebuah Diskursus Politik Pembebasan*, [http://interseksi.org/publications/essays/articles/posisi\\_minoritas](http://interseksi.org/publications/essays/articles/posisi_minoritas).

<sup>49</sup>Teuku Cemal Hussein, *Posisi Kelompok Minoritas Magribi Dalam Masyarakat Perancis Pada Dasawarsa 1980*, Skripsi, Fakultas Sastra UI, 3 Maret 1992, hlm. 14.

<sup>50</sup>“*Namaku, Identitasku*,” Majalah Tempo, Edisi 3-9 Juni 2013, hlm. 86.

mendefinisikan partai politik lokal. Partai politik lokal mempunyai batas limitasi wilayah, karena hanya bersifat eksklusif suatau daerah.<sup>51</sup>

Keberadaan partai lokal di negara ini terkait dengan pemberian status otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh. keberadaan partai lokal di provinsi ini lepas hubungan dengan partai nasional. Dengan kata lain, keberadaan partai-partai lokal di Aceh bukan cabang dari partai di tingkat Nasional.

### **2.2.7 Partai Politik Lokal di Indonesia**

Partai politik lokal di Indonesia telah ada sejak pelaksanaan pemilu pertama kali di gelar di Indonesia, 1955. Pada perkembangannya partai politik lokal tersebut kemudian tenggelam oleh kebijakan penguasa yang tidak memberi ruang hidup bagi partai politik lokal. Peralihan kekuasaan dari era Sukarno ke era Orde Baru melahirkan kebijakan yang tidak hanya mematikan tumbuhnya partai partai yang bersifat nasional namun, juga yang bersifat lokal. Pada era berikutnya, partai politik lokal kemudian lahir kembali beberapa tahun pasca orde baru, tetapi itu pun terbatas hanya untuk wilayah Aceh dan stuktur peluang juga di Papua. Bahkan pada Orde Baru hanya ada tiga partai politi yang bergerak pada skala nasional, yaitu Golkar, PPP, PDI. Pada masa reformasi, yaitu masa setelah orde baru tumbang, partai politik lokal kembali diberi ruang hidup tetapi hanya berlaku untuk daerah tertentu saja, yaitu Aceh dan Papua<sup>52</sup>.

---

<sup>51</sup>Sigit pamungkas, partai politik teori dan praktik di indonesia,2011, institute for democracy and welfarism hlm,205

<sup>52</sup>Sigit pamungkas, partai politik teori dan praktik di indonesia,2011, institute for democracy and welfarism hlm,212-213

## 2.2.8 Partai politik lokal Aceh

Aceh, melalui UU no. 21 Tahun 2001 pasal 28, keberadaan partai lokal masih berupa stuktur kesempatan karena ketidak tegasnya regulasi dalam mengatur tentang eksistensi partai politik lokal. Khusus di Aceh, perjuangan GAM yang ingin melepaskan Aceh dari Indonesia telah melahirkan sejumlah respon dari pemerintah Indonesia mulai dari operasi militer sampai pada perundingan damai. Titik kulminasinya adalah adanya perjanjian helsingki (2005) antara GAM dengan pemerintahan indonesia. Pembentukan Partai lokal dan pelaksanaan pilkada merupakan bagian dari kesepakatan penting dari hasil perjanjian damai Helsinki, dan pada saat bersamaan GAM mengubah tuntutan merdeka menjadi pemerintahan sendiri (self government). Kesempatan tersebut merupakan logika perubahan politik dalam kerangka sistem demokrasi<sup>53</sup>.

Adapun partai-partai yang, tergabung dalam pemilu 2009. Namun, pada perjalanannya enam partai lokal yang dinyatakan lolos menjadi kontestan pemilihan pemilihan umum tingkatan lokal di aceh pada tahun 2009 adalah sebagai berikut

### 1. Partai Aman Aceh Sejahtera (PAAS)

Deklarasi : 3 juni 2007  
Azas : Islam (modernis)  
Ketua : Ghazali Abbas Adan  
Sekretaris : Nusri Hamid

---

<sup>53</sup>Sigit pamungkas, partai politik teori dan praktik di indonesia,2011, institute for democracy and welfarism hlm,215

Bendahara : Faisal Putra Yusuf

Alamat : Jl Teuku Nyak Arief, No 159, Banda Aceh

Konstituen utama PAAS adalah bekas pendukung PPP dan kalangan korban konflik, yang menganggap Ghazali konsisten membela hak-hak mereka. Visi PAAS adalah mewujudkan kehidupan rakyat Nanggroe Aceh Darussalam yang demokrasi, berkeadilan dan bermartabat, tenang beribadah, sejahtera dalam kehidupan dan aman dari ketakutan, dengan karakter kepemimpinan yang amanah (terpercaya), istiqamah (teguh pendirian, i'ffah(bersih), musyawarah dan syaja'ah (berani).

## 2. Partai Daulat Aceh (PDA)

Deklarasi : 1 februari 2008

Azas : islam ahlus sunah wal jama'ah, mazhab syafi'i amalan

Ketua : teungku harmen nuriqman (sebelum teungku  
nurkalis MY)

Sekretaris : mulyadi m ramli

Bendahara : amiruddahri

Alamat : kantor DPN PDA, JL Teuku Iskandar, Desa Lambhuk,  
Banda Aceh

PDA didirikan oleh para ulama yang tergabung dalam himpunan Ulama Dayah Aceh (DAYA). Pendukung utama dayah ini adalah kalangan islam yang teguh pada pendirian agamanya. Tujuan PDA adalah

mewujudkan perdamaian di Aceh dalam semangat rekonsiliasi dan reintegrasi. Struktur partai memberikan otoritas yang sangat besar kepada ulama.

### 3. Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA)

Deklarasi : 10 Desember 2007

Azas : Persaudaraan, Kerakyatan, Ke-Aceh-An Dan Keadilan Sosial

Ketua : M Taufiq Abda

Sekretaris : Arhama

Bendahara : Faurizal

Alamat : Kantor DPP Partai Sira, Jl Teuku Nyak Arief No 110, Banda Aceh

Penggerakan utama pendirian partai ini adalah Muhammad Nazar, wakil gubernur Aceh hasil pilkada 2006, dan seorang tokoh yang dipenjara karena aktivitas dianggap berbahaya oleh Orde Baru . SIRA sebagai sebuah partai merupakan transformasi dari SIRA sebagai sebuah organisasi pergerakan yang sebelumnya dengan akronim (Sentral Informasi Referendum Aceh).SIRA sebagai organisasi pergerakan sangat dekat dengan GAM, dan sangat populer ketika dua organisasi ini memobilisasi rakyat Aceh menuntut referendum, 8 november 1999.

Partai ini bersifat inklusif, dan pro dengan gagasan HAM. Visi SIRA terkait dengan isu self-government adalah berusaha

mengembangkan konsep tersebut secara selektif yang sesuai dengan pemerintahan Indonesia dan mampu membawa perbaikan dan kesejahteraan masyarakat Aceh. Konstituen utama partai ini adalah para aktivis, intelektual dan mahasiswa, serta sebagian simpatisan GAM.

#### 4. Partai Rakyat Aceh

Deklarasi : 16 Maret 2006

Ketua : Aguswandi (Sebelum Ridwan H Mukthar)

Sekretaris : Thamrin Ananda

Bendahara : Malahayati

Alamat : Kantor DPP PRA, Jl. T. Iskandar No. 174, Desa Lamgeulumpang, Ulee Kareng, Banda Aceh.

PRA didirikan oleh aktivis dari front perlawanan Demokratik Rakyat Aceh (FPDRA) yang didalamnya berhimpun berbagai organisasi diantaranya Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat Aceh (SMUR), Organisasi Perempuan Aceh Demokratik (ORPAD), Care Aceh dan Pergerakan Demokratik Rakyat Miskin (PDRM).

Pokok perjuangan PRA adalah pengembalian kontrol atas aset-aset ekonomi kepada rakyat Aceh yang saat ini dikuasai oleh perusahaan multinasional-transnasional. PRA sangat anti dengan Kapitalisme, Neokolonialisme dan Liberalisme. Konstitusi partai ini mengarah kepada petani, buruh, pedagang, dan pekerja profesional. Secara spesifik, misi PRA adalah mempercepat perwujudan sistem ekonomi kerakyatan sebagai dasar dari pembangunan ekonomi nasional, mendorong pengembangan

kehidupan politik nasional yang bersatu, berdaulat, dan bermartabat, dengan peran serta masyarakat secara langsung, dan mempercepat proses pencerdasan kehidupan bangsa dengan menyelenggarakan pengembangan sumber daya insani secara berkelanjutan.

#### 5. Partai Aceh

Deklarasi : 7 Juli 2007

Azas : Pancasila Dan Uud 1945 Seta Qanun Meukuta Al-Asyi

Ketua : Muzakir Manaf

Sekretaris : Muhammad Yahya

Bendahara : Hasanuddin

Alamat : Kantor DPP Partai Aceh, Jl Tgk Imam Al-Asyi  
Luengbata, No 48 Banda Aceh

PA merupakan transformasi politik dari GAM. Keinginan untuk membentuk partai politik lokal diumumkan dalam pertemuan GAM ban sigom donya (kongres dunia rakyat aceh) di Banda Aceh, 20-21 Mei 2006, dan dipekuat dalam pernyataan Malik Mahmud, perdana menteri GAM, pada rapat komisi pengaturan keamanan (CoSA) aceh monitoring mission terakhir (ke-44), 2 desember 2006 pada awalnya, PA bernam partai GAM dengan simbol yang sama dengan GAM, tetapi hal itu ditentang oleh jakarta.

Partai ini dapat disebut sebagai gerakan bersenjata menjadi gerakan politik. misi PA adalah

(1) Menyelamatkan kesepakatan MoU Helsinki

(2) Memperjuangkan 70 persen hasil SDA aceh untuk masyarakat aceh

(3) Penegakan hukum untuk perlindungan hak rakyat aceh, dan

(4) Self government. Selain itu, PA juga menginginkan transformasi cara pandang masyarakat dari partai revolusi kepada partai pembangunan.

#### 6. Partai Bersatu Aceh

Deklarasi : 27 januari 2008

Ketua : ahmad farhan hamid

Sekretaris : mohammad saleh

Bendahara : ridwan yusuf

Alamat : kantor dpp pba, jl gabus no 6,kuta alam, banda aceh

Ahmad Farhan Hamid merupakan politikus dari PAN yang menjadi anggota DPR tahun 1999-2009, dan ketika mendirikan PBA masi menjabat sebagai salah satu ketua DPP PAN. Tidak sedikit kader pan yang memprotes langkah pendiri partai ini karna dianggap ambigu. Partai PBS sendiri menekankan prinsip pluralisme dan keterbukaan . misi dari partai ini sendiri adalah mewujudkan masyarakat madani yang adil dan makmur, dengan pemerintahan lokal yang baik dan bersih dalam NKRI yang demokratis dan berdaulat<sup>54</sup> .

---

<sup>54</sup>Sigit pamungkas, 2011, partai politik teori dan praktik di indonesia, instiute of democracy and welfarist,Hlm 217 -219.

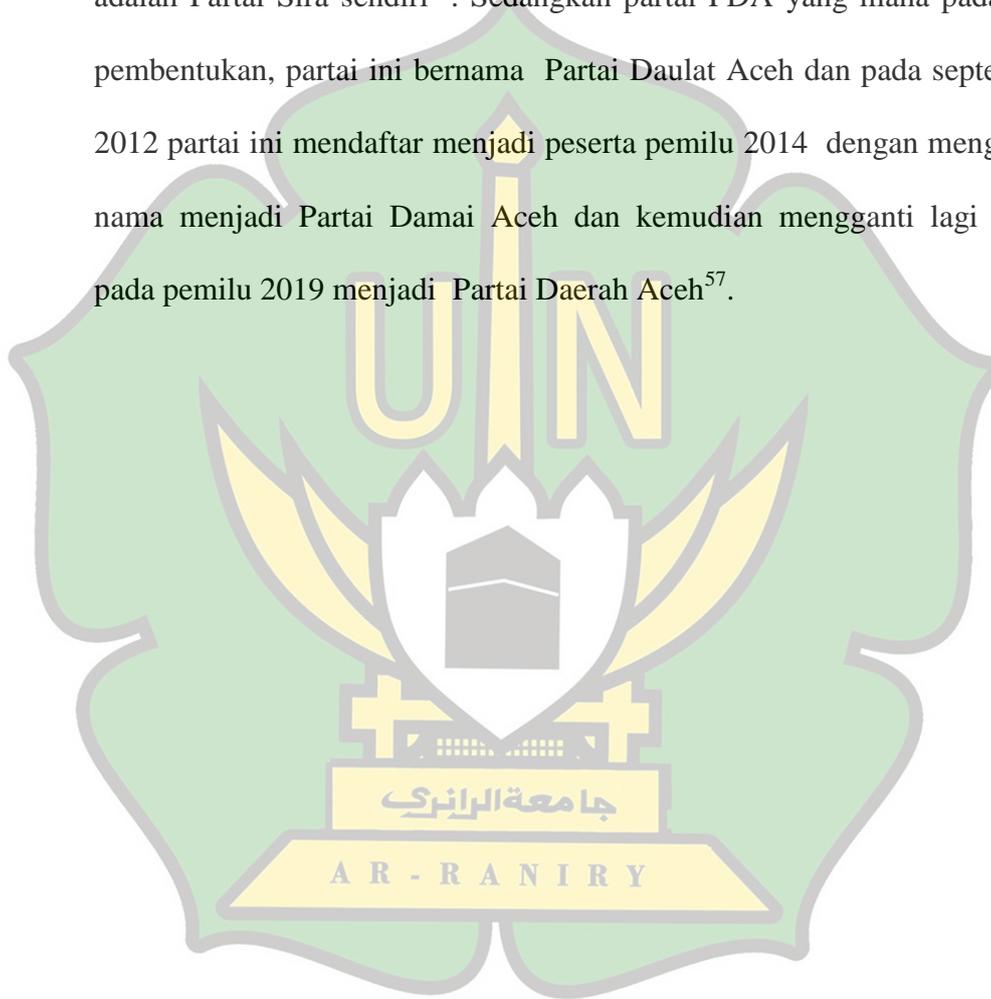
Partai politik lokal mendapatkan respon positive dari masyarakat Aceh dalam keikut sertaannya pada pemilu 2009. Perolehan suara untuk Partai Aceh jauh di atas partai-partai nasional merupakan partai yang telah lama berkiprah dalam konstelasi politik di Indonesia. Ini membuktikan bahwa rakyat memberikan kepercayaan terhadap partai lokal untuk menjalankan fungsinya. Dan dari hasil surfe mengatakan bahwa faktor kedaerahan yang mana adanya ikatan yang kuat antara masyarakat dan partai politik lokal. Dan partai lokal Acehpun adalah harapan dari masyarakat Aceh sendiri untuk mendapatkan perbaikan kehidupannya bukan hanya salah satu paket darim tawaran damai antara pemerintah pusat dan aceh. Dan hal yang penting yang dapat kita simpulkan dari hasil pemilu 2009 yaitu penegasan jarak antara pemerintah pusat dan masyarakat Aceh. Sehingga masyarakat mejadikan partai lokal sebagai alternatif yang mampu menyuarakan aspirasi masyarakat aceh yang selama ini kurang terakomodir dengan baik oleh partai nasional<sup>55</sup>.

Hingga saat ini hanya beberapa partai yang masih bertahan diantaranya partai Aceh, Partai Nasional Aceh, Partai Sira, Dan Partai Daerah Aceh. Partai Aceh masih berdiri kokoh bersama partai PA meski perang politik kian menjadi antara dua kubu tersebut. Dimana dua partai ini merupakan bagian dari cetusan kombatan GAM, dan kedua ketua partai tersebut yaitu mualem dan pak doktor menjadi daya tarik tersendiri dimata masyarakat dengan eksistensi masing-masing. Sejarah perjuangan dan

---

<sup>55</sup>Sigit pamungkas, 2011, *partai politik teori dan praktik di indonesia*, instiute of democracy and welfarist, Hlm 222

rasa kedaerah juga menjadi piciuan akan karier kedua partai tersebut. Berbeda dengan SIRA dan PDA, partai SIRA kembali hadir setelah sekitar 5 tahun berdiam diri, hal ini disebabkan oleh keadaan politik yang di warnai oleh kekerasan dan intimidasi. Dan diperkirakan targetnya adalah Partai Sira sendiri<sup>56</sup>. Sedangkan partai PDA yang mana pada saat pembentukan, partai ini bernama Partai Daulat Aceh dan pada september 2012 partai ini mendaftar menjadi peserta pemilu 2014 dengan mengganti nama menjadi Partai Damai Aceh dan kemudian mengganti lagi nama pada pemilu 2019 menjadi Partai Daerah Aceh<sup>57</sup>.



---

<sup>56</sup>Reza gunawan, KBA.ONE, 12 oktober 2017 diakses minggu 8 desember 2019

<sup>57</sup><https://kumparan.com/acehkini/mengenal-partai-lokal-di-pemilu-2019-dari-eks-gam-sampai-santri-1qr41N8ZcB5>,Kumparan, aceh kini. 9 april 2019,mengenal partai lokal di pemilu 2019, dari eks GAM sampai santri,diakses 8 desember 2019.

## BAB III

### METODELOGI PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

penelitian ini adalah penelitian Kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati<sup>58</sup>

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Argumen peneliti dalam menggunakan pendekatan kualitatif adalah karena dibutuhkan wawancara dan observasi untuk menggali sejauh manakah intensitas partisipasi politik masyarakat etnis Tionghoa Kabupaten Pringsewu pada saat ini<sup>59</sup>.

---

<sup>58</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan penelitian*, Ar-Ruzz Media, Depok 2011, Hal 22.

<sup>59</sup> Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya hlm 6

### 3.2 Lokasi Penelitian

Agar tidak terjadi kekeliruan terhadap para pembaca, maka peneliti menjelaskan tentang fokus penelitian di sini adalah di daerah kota Banda Aceh khusus di Gampong Mulia. Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat bagaimana persepsi masyarakat Tionghoa di gampong mulia terhadap keberadaan partai lokal di Aceh. Alasan tersendiri peneliti menjadikan Gampong mulia sebagai lokasi penelitian yaitu dikarenakan Gampong Mulia sebagai kampung kerukunan sehingga peneliti ingin melihat bagaimana persepsi masyarakat Tionghoa terhadap keberadaan parlok di Aceh.

Mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Will Kymlicka tentang politik multikultural bahwa identitas bersama diperlukan untuk menjamin stabilitas dalam demokrasi, persamaan bagi minoritas bangsa melalui hak-hak berbahasa dan bentuk-bentuk terbatas Otonomi Daerah, Agama, Budaya Dan Menulis Ulang Sejarah. Penelitian ini terfokus pada masalah yaitu: Persepsi Masyarakat Tionghoa Terhadap Partai Politik Lokal Di Aceh.

### 3.3 Informan Penelitian

Informan adalah orang yang akan di wawancarai, diminta informasi oleh pewawancara data yang diperoleh dari responden (orang yang di wawancarai) pertama akan di jadikan acuan untuk menentukan responden selanjutnya dan begitu seterusnya. Dan dalam hal ini yang akan menjadi informan untuk melengkapi penelitian ini ialah :

1. Kho Khie Siong, Ketua HAKKA Aceh
2. Pak Rasyid, Ketua Mualaf Aceh, anggota PA Tahun 2014-2017
3. Masyarakat Tionghoa Gampong Mulia

### 3.4 Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Sehubungan penelitian ini adalah kualitatif maka untuk sumber data yang terdapat dalam penelitian ini seluruhnya berasal dari penelitian yang meliputi penelitian terdahulu, serta terjun langsung ke lapangan untuk menemukan data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun data yang dipergunakan sebagai berikut :

#### 3.4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara meneliti langsung ke lapangan atau hasil wawancara langsung dengan pihak yang terlibat dalam pelaksana.

#### 3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang bersumber dari Buku-Buku, Jurnal, Skripsi, Perundang-Undangan, Surat Kabar Dan Sumber-Sumber Lain Yang Berkaitan Dengan Penelitian Peneliti.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini peneliti hanya menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

#### Wawancara

Pada penelitian ini digunakan metode wawancara berstruktur untuk mengarahkan jawaban pada pola pertanyaan yang dikemukakan. Pengumpulan data dengan wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi<sup>60</sup>.

Metode Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penulisan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang di wawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang cukup lama guna menggali informasi pokok permasalahan.<sup>61</sup>

### 3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan cara mengolah data, memilah-milah menjadi satuan yang dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan. Data dalam penelitian ini

---

<sup>60</sup>Singarimbun, Masri. 1989. Metode Penelitian Survei. PT Pustaka LP3ES Indonesia. Jakarta

<sup>61</sup>Burhan Bungin, Metodologi Penulisan Kualitatif. (Jakarta: Kencana, 2009). H.108

bersifat deskriptif analisis yakni menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan atau gejala-gejala tertentu dan hubungan antar gejala tersebut.

Secara definitif, analisis data merupakan prose pengorganisasi dan pengurutan data kedalam pola kategori dan suatu uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat di rumuskan hipotesis kerja seperti yang di rumuskan oleh data<sup>62</sup>.

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, dokumentasi pribadi, dokumentasi resmi dan gambar<sup>63</sup>.

Adapun langkah-langkah analisis data yang peneliti lakukan yaitu:

1. Mengumpulkan atau merangkum data yang peneliti peroleh dari hasil wawancara dengan Masyarakat kemudian dianalisis.
2. Menafsirkan data yang peneliti peroleh dan kemudian menarik kesimpulan terhadap apa yang diteliti.

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke

---

<sup>62</sup>Lexi J.moleong, metodologi penelitian kualitatif,( bandung :rosdakarya,2001)

<sup>63</sup>Lexi,J moleong, metodologi penelitian kualitatif edisi revisi, ( bandung: rosdakarya,2002),hlm 190

lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Letak Geografis Gampong Mulia

Melihat letak geografis gampong Mulia tentunya kita perlu menjabarkan terlebih dahulu kecamatan Kuta Alam, dimana Gampong Mulia merupakan bagian dari gampong Kuta Alam. Yang mana kuta alam merupakan kecamatan yang berkabupaten Banda Aceh. Letak geografis Kuta Alam sendiri 05,56802 lintang utara dan 095,33568 bujur timur, sedangkan luas kecamatan adalah 10,2045km (1020,45 ha). Batas kecamatan meliputi Selat Malaka disebelah utara, kecamatan Baiturrahman disebelah selatan, kecamatan Syiah Kuala disebelah timur dan kecamatan Kuta Raja disebelah barat. Dibawah kecamatan Kuta Alam tersebut bernaung 11 (sebelas) gampong diantaranya Gampong Penayong, Gampong Laksana, Gampong Keramat, Gampong Kuta Alam, Gampong Berawe, Gampong Kuta Baru, Gampong Bandar Baru, Gampong Mulia, Gampong Lampulo, Gampong Lamdingin, dan Gampong Lambaro Skep.<sup>64</sup>

Disini Gampong Mulia merupakan titik lokasi penelitian, dimana Gampong Mulia dikenal dengan wilayah multi agama, dan suku, dengan jumlah pemeluk Agama Islam 4003 orang, Kristen Protestan 49 orang, Kristen Katolik 68 orang, dan Agama Budha 220 orang. Dan jumlah sarana

---

<sup>64</sup>Badan pusat statistik kota banda aceh, kuta alam dalam angka 2018,cv odaiba hlm,2

peribadatan 2 Mesjid, 2 Menasah, 3 Gereja, dan Satu Wihara. Dengan luas wilayah 68 ha, yang mana disebelah utara berbatasan dengan Gampong Lampulo dan Gampong Lambaro Skep, disebelah timur berbatasan dengan Gampong Bandar Baru, disebelah selatan berbatasan dengan Gampong Penanyong dan Gampong Keuramat, Sedangkan di Sebelah barat berbatasan dengan Gampong Kuta Raja.<sup>65</sup>

Jumlah penduduk Gampong Mulia secara keseluruhan ialah sebanyak 4340 jiwa dengan rata-rata jumlah penduduk 3 (tiga) perkepala rumah tangga. Jika diurutkan berdasarkan jenis kelamin 2376 jiwa adalah laki laki, dan 1964 jiwa adalah perempuan. sedangkan sarana pendidikan di Gampong Mulia hingga saat ini telah mencapai 3 (tiga) bangunan Sd Negeri, 1(satu) Sd Swasta, 1 (satu) Smp Swasta, 2(dua) Sma Negeri,1 (satu) Swasta, dan 2(dua) SMK negeri. Dibidang perindustrian sendiri Gampong Mulia memiliki 1(satu) panglong kayu, 12 (dua belas) industri taylor, 1(satu) perabot, dan 39 industri makanan.<sup>66</sup>

Gampong mulia sendiri memiliki daya tarik untuk kita telusuri, dimana Gampong Mulia tersebut yang didalamnya merupakan masyarakat dengan berbagai macam kultur,dan agama. Namun, sejauh pengamatan peneliti gampong mulia merupakan gampong yang aman dan tentram meski perbedaan budaya tidak menjadikan gampong mulia bentrok antar masyarakat. Di

---

<sup>65</sup>Badan pusat statistik kota banda aceh, kuta alam dalam angka 2018,cv odaiba hlm,4

<sup>66</sup>Badan pusat statistik kota banda aceh, kuta alam dalam angka 2018,cv odaiba hlm,21-

buktikan dengan dikukuhkannya gampong mulia oleh walikota banda aceh pada kamis,28 desember 2018.<sup>67</sup>

## 4.2 Hasil Penelitian

### 4.2.1 Persepsi Masyarakat Tionghoa Terhadap Partai Lokal di Aceh

#### 4.2.1.1 Partai Aceh adalah partai yang baik.

Masyarakat Tionghoa menganggap partai Aceh selaku partai lokal yang tergolong kedalam partai yang bagus dan baik, namun segelintir aktor di dalamnya menjadikan partai ini terlihat tidak baik seperti yang di katakan oleh bapak Rasyid selaku masyarakat Tionghoa yang pernah bergabung dalam partai PA:

“Selama saya bergabung disalah satu partai lokal (PA), selaku masyarakat Tionghoa yangterwakili dalam partai yang pernah saya ajukan untuk kepentingan masyarakat banyak khususnya Tionghoa yaitu dipasar penayong yaitu pemasangan kanopi di pasar penayong, hal itu didasari oleh janji hitam diatas putih sehingga dapat terpenuhi permintaan dari masyarakat Tionghoa selain itu sudah tidak ada lagi kontribusi dari pihak pemerintah terhadap masyarakat Tionghoa. Itulah kenapa dengan banyaknya janji-janji yang di berikan hanya itu yang terealisasi sehingga saya pribadi sudah tidak ingin lagi bergabung dalam partai manapun. Dan pada saat saya didalam partai, mereka seperti hanya menjadikan saya alat bagi kepentingan mereka. Namun, untuk partisipasi saya dan masyarakat Tionghoa tetap memberikan partisipasi sepenuhnya, untuk terwujudnya Aceh yang damai dan tentram”<sup>68</sup>.

Dari paparan di atas kita bisa menyimpulkan bahwa itikad baik dari masyarakat Tionghoa dengan tetap memberikan aspirasi penuh terhadap baik

---

<sup>67</sup>Mulia-gp.bandaacehkota.go.id,14 januari 2018 dia akses 4 desember 2019

<sup>68</sup>Hasil wawancara dengan Bapak RS pada tanggal 22,juli,2019

itu pemilu atau pilkada, meski dengan kekecewaan terhadap beberapa partai lokal sehingga menimbulkan kehati-hatian untuk menjadi bagian dari partai baik dari segi anggota ataupun timsesnya. Jika dilihat dari organisasi HAKKA merupakan salah satu organisasi non partai yang sering menjadi incaran ketika pemilu tiba.

“Hakka merupakan suatu yayasan yang di didirikan delapan tahun yang lalu yang mana wujud dari adanya yayasan ini adalah untuk memberi perubahan bagi masyarakat Tionghoa sendiri. Dengan adanya yayasan ini hingga tercipta relasi dan kerukunan di antara masyarakat Tionghoa sendiri khususnya, dan pemerintah pada umumnya. Dianggap perlunya perubahan dan kesinambungan antara masyarakat Tionghoa dan pribumi maka terciptalah yayasan hakka tersebut yang saat ini sudah banyak melakukan tindakan tindakan sosial namun, yayasan ini menolak keras untuk terlibat dalam politik karena tidak ingin keterikatan yang nantinya hanya menjadi atau terciptanya sekat antara kedua belah pihak namun tidak menutup diri untuk kegiatan atau sosialisasi di luar politik baik itu sesama etnis ataupun dengan masyarakat pribumi”.<sup>69</sup>

Terlepas dari organisasi HAKKA dan mantan kader partai lokal, tentu peran masyarakat adalah hal selanjutnya yang ingin peneliti lihat. Dan dari hasil wawancara dengan beberapa masyarakat Thionghoa mereka mengatakan bahwa mereka tidak menganggap penting persoalan partai. Dengan artian bahwa pekerjaan mereka ialah hal utama yang harus mereka utamakan, mengenai partai sendiri beberapa masyarakat lebih dominan merujuk kepada apa yang dihimbau oleh pihak HAKKA selaku atasan masyarakat Tionghoa tersendiri. Masyarakat Tionghoa beranggapan bahwa partai politik lokal sama saja dengan partai nasional, dikarnakan selama ini mereka secara personal tidak merasa adanya kontribusi dalam bentuk apapun dari partai lokal sendiri.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan bapak HR pada tanggal 18, juli, 2019

<sup>70</sup> Hasil wawancara dengan Buk IC pada tanggal 19, oktober, 2019

#### 4.2.1.2 Parlok Dan Parnas Sama Saja, Kami Tidak Memihak

Beberapa masyarakat Thionghoa lainnya mengatakan bahwa seperti kakak SK (inisial) seorang penjual mie ayam yang saya jumpai di pasar Penayong beliau mengatakan bahwa:

“Sayasebenarnya tidak paham persoalan partai lokal maupun nasional,di mata saya semua sama,sama halnya ketika saya beranggapan bahwa masyarakat aceh dan Thionghoa itu sama saja. Saya sendiri sangat berbaur dengan msyarakat aceh meski ada beberapa masyarakat Thionghoa yang tidak welcome terhadap masyarakat aceh. Persoalan memihak itu saya pribadi tidak memihak kepada siapapun dan untuk hal ini saya asal nyoblos aja, ya namanya kewajiban kita ngikut aja di suruh milih ya kita memilih.”<sup>71</sup>.

Dari masyarakat Thionghoa lainnya yaitu pak Ac (Inisial) beliau adalah salah satu pemilik bengkel di depan sekolah metodist yang mana beliau sudah sangat berbaur dengan masyarakat Aceh dimana saat saya jumpai, beliau sedang duduk sambil ngobrol bersama tukang ojek online yang berasal dari suku aceh,dan beliau langsung menyambut saya ramah dengan istrinya saat saya memperkenalkan diri untuk meminta waktu beliau, dalam wawancara ini beliau memaparkan bahwa:

“Selama ini hubungan saya dengan masyarakat sangat baik,malah kami sudah seperti saudara,jika dipertanyakan soal partai kami tidak dapat memberikan banyak jawaban,karna kami sendiri sejujurnya tidak mengetahui yang mana partai lokal yang mana partai nasional, karna kami tidak mempersoalkan perihal partai hal itu biasanya di urus oleh para ketua, seperti lembaga hakka,kami hanya mengikuti saja, apa yang di tunjuk oleh hakka untuk dipilih kami akan ikut untuk memilih kandidat yang disarankan. untuk selama ini kami tidak merasakan adanya kontribusi yang didapat dari partai lokal khususnya, bahkan

---

<sup>71</sup>Wasil wawancara Kak OK tanggal 19 oktober 2019

ambulan yang di janjikan untuk rumah duka saja belum kunjung kami dapatkan”<sup>72</sup>

Dari hasil wawancara tersebut kita dapat memahami bahwa masyarakat Thionghoa tidak melihat penting partai atau kandidat legislatif namun hanya beberapa orang yang sudah mulai terbuka sehingga terciptanya suatu lembaga yaitu hakka yang mampu mengrekrut masyarakat Thionghoa untuk ikut serta dalam memilih. Itulah mengapa lembaga-lembaga ini menjadi incaran para parlok ketika pesta rakyat semakin dekat. Dan dikarenakan ketundukan masyarakat Thionghoa terhadap pemukanya, itu juga yang menyebabkan mudahnya memadatkan suara untuk suatu kubu tertentu.

Disini kita melihat bahwa masyarakat menganggap bahwa Parnas dan Parlok sama saja yakni didasari oleh tindakan dari pihak parlok sendiri dimana masyarakat Tionghoa tidak merasakan langsung secara personal kontribusi yang di berikan oleh parlok dikarenakan kontribusi yang di salurkan bukan kepada perseorangan atau kelompok akan tetapi kepada organisasi utama masyarakat Tionghoa. Hal inilah yang mendasari argumen masyarakat Tionghoa terhadap Parnas dan Parlok.

### **4.3 Janji kontribusi terhadap pihak Tionghoa dari pihak parlok**

#### **4.3.1 Kanopi Pasar Penayong**

Kanopi pasar penayong merupakan salah satu kontribusi dari partai lokal yang terealisasi yang mana infrastuktur tersebut di peroleh

---

<sup>72</sup>Hasil wawancara dengan Bapak AC tanggal 19 oktober 2019

dari salah satu partai lokal yaitu partai aceh dimana seperti paparan pak Rasyid selaku mantan kader partai aceh, beliau mengatakan bahwa:

Dari pihak partai lokal selama beliau berkecimpung didalam Partai Aceh hal yang terealisasi adalah kanopi pasar penayong. Ini adalah Insfrastuktur yang di butuhkan untuk kemaslahatan bersama, terkusus masyarakat Tionghoa.<sup>73</sup>

#### 4.3.2 Diajak Bergabung Menjadi Kader

Politik bagi masyarakat Tionghoa selaku masyarakat minoritas bukanlah suatu yang penting. Namun, mereka menganggap ini sebagai suatu pekerjaan seperti yang di jelaskan pak Rasyid bahwa:

“kita hidup butuh uang, butuh makan, ajakan menjadi kaderpun diterima meski mengetahui bahwa posisi selaku masyarakat minoritas akan membuat beliau dikesampingkan aspiranya, hal ini dianggapnya sebagai sebuah pekerjaan “<sup>74</sup>.

jika dilihat dari aspek ekonomi pihak Parlok tidak memberikan secara langsung kontribusi dalam hal ini. Namun ,lebih kepada memberi peluang untuk mendapatkannya, dalam artian harus adanya pihak yang di untungkan dari peluang yang di berikan tersebut. Dan melihat dari segi keamanan tidak adanya perjanjian tertulis antara pihak Parlok dan Tionghoa untuk jaminan keamanan maksudnya selama kedua belah pihak saling menghargai dan menghormati maka akan terbentuknya keselarasan dan terhindari dari pertikaian.

---

<sup>73</sup>Hasil wawancara dengan bapak RS pada tanggal 22 juli 2019

<sup>74</sup>Hasil wawancara dengan bapak RS pada tanggal 22 juli 2019

### 4.3.3 MEMBERI RESPON (BUKDARWATI AGANI PNA)

Tidak banyak memang yang bisa di janjikan oleh partai lokal khususnya partai PA untuk masyarakat Tionghoa sebagai masyarakat minoritas, meskipun begitu, seringkali pada saat menjelang pemilu dan pilkada setiap dari parlok mendatangi salah satu yayasan Tionghoa yang menjadi tujuan mereka untuk bisa mendapatkan suara agar bisa maju ke parlemen. Kontribusi pihak partai terhadap Tionghoa memang sangat sedikit akan tetapi pada masa pemerintahan gubernur Irwandi Yusuf, hubungan pemerintahan dengan masyarakat Tionghoa sedikit memberi ruang seperti hasil wawancara yang di paparkan oleh pak Acong, salah satu pengurus yayasan Hakka Aceh yang mana yayasan ini merupakan incaran para calon legislatif untuk mendapatkan suara, beliau mengatakan bahwa:

“untuk tahun ini kami fullkan suara untuk PNA yaitu Irwandi-Nova dikarenakan pemerintah yang sebelumnya tidak adanya kontribusi bahkan interaksi terhadap masyarakat Tionghoa, sedangkan Irwandi semasa masih dalam jabatan beliau merupakan sosok yang welcome dan Ibu Darwati Agani juga sosok yang sangat peduli terhadap kegiatan-kegiatan sosial yang kami adakan, seperti memberi respon terhadap kegiatan-kegiatan sosial yang diadakan oleh masyarakat Tionghoa”.<sup>75</sup>

Dari paparan di atas dapat kita simpulkan bahwa peran partai lokal terhadap masyarakat Tionghoa masih tergolong sangat minim, dan kontribusi serta interaksi masih dalam lingkup dingin. Dalam artian komunikasi yang terbangun masih kurang rasa kekrabannya. Pada 2012 Muzakir Manaf atau Mualem berhasil menggait petinggi Tionghoa untuk menjadi timses mereka

---

<sup>75</sup>Hasi wawancara dengan bapak ac pada tanggal 18 juli 2019

dimana pada saat itu pak Rasyid selaku masyarakat Tionghoa yang masih bergabung dalam Partai Aceh, Beliau merupakan salah satu masyarakat Thionghoa yang pernah berkecimpung di dalam parlok(partai lokal) yang melobi masyarakat Tionghoa agar ikut berpartisipasi untuk memberikan suara terhadap partai Aceh yaitu Zaini Abdullah- Muzakir Manaf<sup>76</sup>.

Dalam hal ini partisipasi yang diberikan terhadap Partai Aceh tidak semata-mata hanya terbujuk rayu manis elit politik tetapi lebih kepada masyarakat Tionghoa memberikan syarat terhadap parlok yang datang dan mengajukan permintaan agar ada dari pihak partai yang memberikan kanopi untuk pasar penanyong namun hanya Partai Aceh yang menyanggupi permintaan dari pihak Tionghoa tersebut sehingga suara di apresiasikan kepada Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf. Meskipun setelah kedudukannya tidak ada lagi kontribusi ataupun komunikasi antara pihak pemenang dan pihak pengusung. Dalam wawancara yang peneliti teliti mereka mengatakan bahwa:

“Kami pihak minoritas tidak menuntut banyak dari pemerintah,jika di berikan ambulan saja untuk rumah duka kami sudah sangat bahagia,apalagi jika ada acara sosial yang kami laksanakan mereka dapat atau berkenan untuk hadir itu sudah sangat menyenangkan hati kami, di situ kami merasa di hargai merasa ada di mata pemerintah, tapi setelah terpilih tidak ada kontribusi apapun terhadap kami pihak minoritas apalagi perihal komunikasi, memang sama sekali tidak ada”<sup>77</sup>

Partai politik merupakan komponen penting dari system politik modern, yang bersendikan perwakilan politik. Negara medern,yang tidak

---

<sup>76</sup>Hasil wawancara pak RS pada tanggal 22 juli 2019

<sup>77</sup>Hasil wawancara Bapak Hr pada 19 oktober 2019

mungkin lagi menerapkan demokrasi langsung, baik disebabkan wilayah yang luas, jumlah penduduk yang besar, maupun diferensiasi sosial dari warga negara, memerlukan lembaga dan struktur sosial-politik yang memungkinkan warga negara sebagai pemilik negara yang sesungguhnya berpartisipasi menentukan bentuk dan arah perjalanan kehidupan bersama. Dan antara lembaga dan struktur politik itu adalah badan perwakilan dan partai politik.<sup>78</sup>

Pemilu merupakan instrumen politik yang paling esensi dalam sebuah negara demokrasi. Sebagai suatu sistem dalam pemilihan kepemimpinan suatu bangsa, pemilu seringkali menyajikan kontestasi diantara para politisi dan para pendukung pengusung, yang tidak jarang pertarungan di arena politik dimainkan oleh para aktor politiknya.

Aceh, sebagai provinsi yang mempunyai kewenangan khusus melalui UU No. 11 Tahun 2006, yang berlandaskan pada UUD No 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, Aceh telah melakukan transformasi politik secara fenomenal, salah satunya memperkenalkan instrumen politik baru di Indonesia, yaitu memberikan kesempatan bagi calon perseorangan untuk mencalonkan dirinya sebagai Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota pada Pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2006. Selain itu, Aceh juga mempunyai kewenangan mendirikan partai lokal (parlok) yang tidak dimiliki oleh provinsi lain di Indonesia. Ketentuan tentang kewenangan pendirian parlok di Aceh ditetapkan pada Bab XI dimana kewenangan mendirikan partai lokal

---

<sup>78</sup> Ahmad Farhan Hamid, *Partai Politik Lokal Di Aceh* Cet.1 (Jakarta:Kemitraan, Mei 2008) Hlm.1.

diberikan kepada setiap warga Aceh sekurang-kurangnya terdiri dari 50 orang (Pasal 75). Parlok hanya mempunyai hak untuk ikut dalam pemilu legislatif untuk tingkat propinsi (DPRA/Dewan Perwakilan Rakyat Aceh), dan DPRK (Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota), namun tidak untuk legislatif DPR-RI.<sup>79</sup>

Pada pemilu 2014-2017 yang dimenangkan oleh pihak PA (Partai Aceh) dan (Partai Nanggroe Aceh), yang mana pada pemilu ini tidak lepas dari yang namanya keikutsertaan dari pihak non-Aceh dalam rangka kemenangan partai di atas, salah satunya adalah masyarakat Tionghoa yang berkedudukan di Banda Aceh.



---

<sup>79</sup>Chairulfahmi, “Prilaku Politik Pada Demokrasi Transisi: Studi Kasus di Provinsi Aceh Pada Pemilu 2014”, *Jurnal Aceh Institut*, hlm. 220-221.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Persepsi merupakan praduga yang muncul akibat mendengar, melihat, serta pengetahuan terhadap suatu objek. Masyarakat dapat berpersepsi terhadap keberadaan partai lokal di Aceh dikarenakan mereka pernah melihat dan mendengar serta memiliki pengetahuan akan keberadaan partai lokal di Aceh. Serta dalam partisipasi politik mereka punya hak yang sama oleh hal itu dari tindakan partisipasi dapat kita melihat bagaimana persepsi masyarakat Tionghoa tersebut terhadap parlok (partai lokal). Adapun yang menjadi kesimpulan dari penelitian yang saya teliti adalah

partai politik lokal merupakan partai yang bagus di buktikan dengan sudah adanya kontribusi yang di dapatkan oleh masyarakat Tionghoa dari pemerintah yang mana kontribusi tersebut untuk kemaslahatan masyarakat Tionghoa. Sehingga masyarakat merasakan manfaat yang di dapatkan dari kontribusi tersebut. Namun, dalam beberapa hal masyarakat Tionghoa menganggap bahwa Partai Lokal dan Partai Nasional sama saja dikarenakan kontribusi yang tersalurkan bukanlah secara personal melainkan secara etnis . langsung pada organisasi komunitas Tionghoa. Hal ini yang menjadikan sebagian masyarakat beranggapan bahwa Parnas dan Parlok sama saja.

Adanya hubungan atau interaksi yang kian membaik antara masyarakat Tionghoa dan masyarakat Aceh di sekitarnya. Karena terlihat interaksi masyarakat dalam

kehidupan sehari-hari saling respon satu sama lain dan saling menghargai antara umat beragama. Serta saling menerima adanya perbedaan budaya, agama dan etnisitas.

## 5.2 Saran

Melihat apa yang terjadi dilapangan peneliti dapat memberi saran sebagai berikut:

1. Partai Aceh selaku partai lokal yang di harapkan dengan terbentuknya partai lokal mampu menjadi wadah aspirasi bagi segala kalangan yang ada di wilayahnya baik itu pihak pribumi maupun pihak minoritas (Tionghoa) sehingga tidak ada lagi pihak yang dikesampingkan dan fungsi partai lokal mampu berfungsi dengan semestinya sesuai cita-cita terbentuknya partai lokal.
2. Adanya sosialisasi terhadap masyarakat Tionghoa mengenai partai sehingga tidak terjadi kekeliruan pandangan anantara masyarakat Thionghoa dan partai lokal sehingga tidak ada lagi masyarakat Tionghoa yang buram akan makna dan fungsi partai lokal sendiri.
3. Adanya sosialisasi dalam hal menghargai serta mengakui masyarakat Tionghoa sebagai masyarakat yang perlu untuk di ayomi sama seperti masyarakat Aceh pada umumnya. Agar mereka tidak lagi merasakan adanya perbedaan pribumi dan non pribumi.
4. Sesama masyarakat aceh dan masyarakat minoritas saling berkaitan serta saling menghargai etnis dan budaya yang berbeda.

5. Untuk peneliti selanjutnya agar dapat melanjutkan serta menjadikan penelitian sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Abdillah, Ubed. *Politik Identitas Etnis, Pergulatan Tanda Tanpa Identitas*. Magelang: IndonesiaTera, 2002.

Abdullah,amin.*Pendidikan Multikultural*, Yogyakarta.Pilar Media. .

Andi Prastowo,*Metode Penelitian Kualiatatif Dalam Perspektif RancanganPenelitian*, Ar-Ruzz Media, Depok 2011,

A.Rani Usman,*Etnis Cina Perantauan Di Aceh*.Cet1 (Jakarta: Yayasan OborIndonesia February, 2009)

AhmadFarhan Hamid,*Partai Politik LokalDiAceh*, Cet.1(Jakarta:Kemitraan,Mei2008)

Burham Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Format-Format Kualitatif danKuantitatif*,(Surabaya: Airlangga University Pres 2001),

Benny G. Setiono, *Tionghoa Dalam Pusaran Politik*,Elkasa: Jakarta, 2002

Grigg, ray, tao, *KehidupanBatam*, Center Luky Publishers,2002

Kong Yuangzi, *Merangkul Cina : Hubungan Cina Indonesia Pasca Soehrto*, Jakarta: Gramedia Pustaka, (2009), hlm. 24.

Justian Suhandinata, SE, *WNI Keturunan Tionghoa dalam Stabilitas Ekonomi dan Politik di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, 2009

Kymlicka,will.*kewargaan multikultural*,203 LP3ES. Jakarta

Leo Suryadinata, *Dilema Minoritas Tionghoa*, Grafiti Pers, Pustaka LP3ES Indonesia, 1984

Leo Suryadinata, *Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia*, Pustaka LP3ES Indonesia, 2005

Liliweri, Alo. 2005. *Prasangka dan Konflik*. LKIS.Yogyakarta.

Leo suryadinata,ethnic chinese in contemporary, Indonesia 2013

Liliweri, Alo. 2005. Prasangka dan Konflik. LKIS. Yogyakarta.hlm 42

Maarif, Ahmad Syafii. Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita, Jakarta, Democracy Project, 2012.

Paul R Brass,theory and comparison,ethnicity and nationalism,1991

Peter Carey, Orang Jawa dan Masyarakat Cina 1755-1825, Jakarta: Pustaka Azet, 1986,

Rakhmat, jalaluddin.2004. Psikologi Komunikasi. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Setyaningrum, Arie.”Memetakan lokasi bagi politik identitas dalam wacana politik poskolonial dalam “Politik perlawanan” Yogyakarta: IRE, 2005

Suryadinata Leo,Negara Dan Etnis Tionghoa, Kasus Indonesia,Jakarta,Pustaka LP3ES Indonesia,2002,

Teuku Cemal Hussein, Posisi Kelompok Minoritas Magribi Dalam Masyarakat Perancis Pada Dasawarsa 1980, Skripsi, Fakultas Sastra UI, 3 Maret 1992

Victor Purcell, The Chinese in Southeast Asia, Second Edition Oxford University Press, Kuala Lumpur, 1981.

William G. Skinner, The Chinese Minority, dalam Ruth T. McVey (ed), Indonesia (New Haven: Southeast Asia Study, Yale University, 1963)

#### JURNAL

Chairulfahmi, “Prilaku Politik Pada Demokrasi Transisi:Studi Kasus di Provinsi Aceh Pada Pemilu 2014”, *Jurnal Aceh Institut*

Eddie Riyadi Terre, *Posisi Minoritas Dalam Pluralisme: Sebuah Diskursus Politik Pembebasan*,[http://interseksi.org/publications/essays/articles/posisi\\_minoritas](http://interseksi.org/publications/essays/articles/posisi_minoritas).

Ety Gustin Merdeka Waty,*Orientasi Politik Etnis Tionghoa Di Kota Makassar*, FISIP Universitas Hasanuddin, 2016,

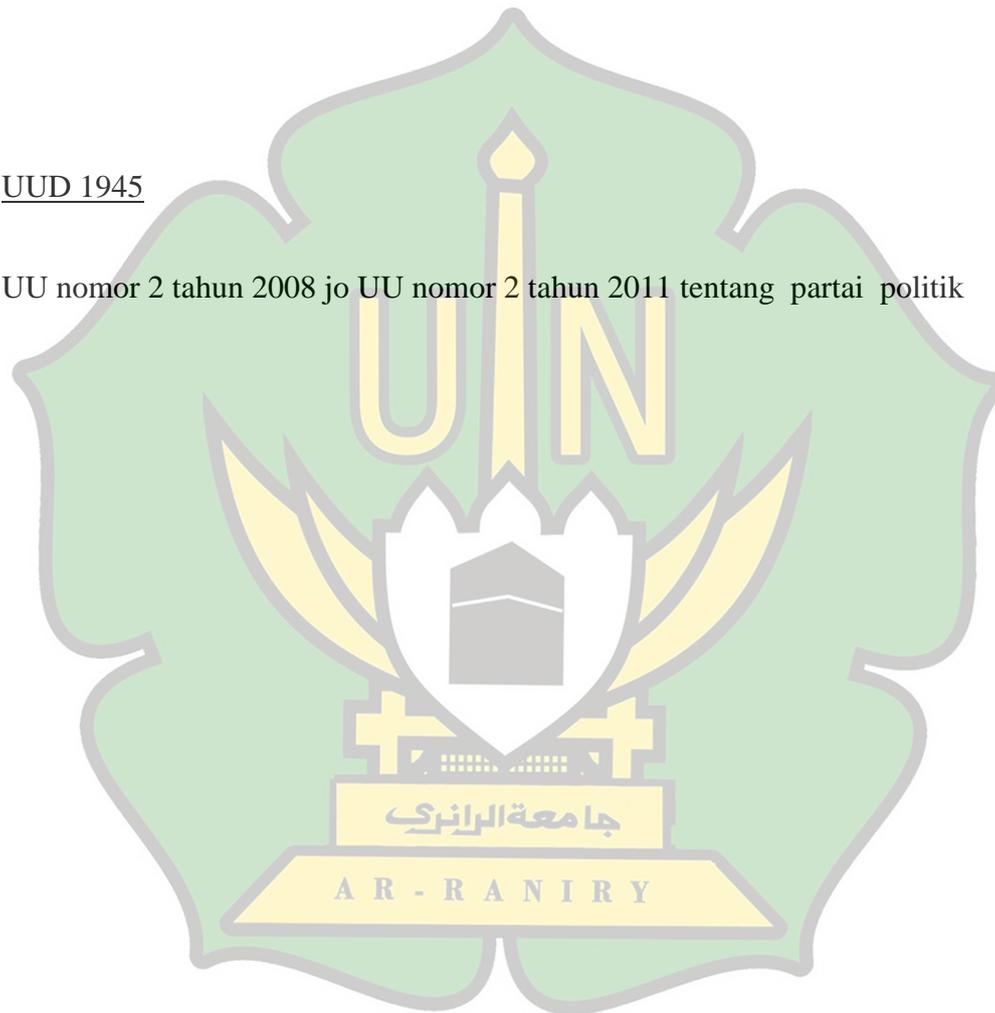
MAJALAH

“*Namaku, Identitasku,*” Majalah Tempo, Edisi 3-9 Juni 2013, hlm. 86.

Ons Untoro. (2000). *Cina, Jawa dan Pribumi*, Tembi

UUD 1945

UU nomor 2 tahun 2008 jo UU nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### IDENTITAS DIRI

1. NamaLengkap : Cut Nyak Meuligoe
2. Tempat, TanggalLahir : SPN seulawah, 10 september 1998
3. JenisKelamin : Perempuan
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Agama : Islam
6. Alamat sekarang : Jln. Malahayati, Desa Labuy Kec. Baitussalam,
7. Asal : Aceh Besar
  - a. Kecamatan : Baitussalam
  - b. Provinsi : Aceh
8. No. Telpn : 085275914013
9. Email : [meuligoe1009@gmail.com](mailto:meuligoe1009@gmail.com)

### RIWAYAT PENDIDIKAN

- SD Negeri 4 kuta alam : Tahun 2003 - 2009
- MTSS Babun Najah : Tahun 2009 - 2012
- MAS Babun Najah : Tahun 2012 - 2015
- S1 IlmuPolitikUinArRaniry Banda Aceh : Tahun 2015 – Sampaisekarang

### ORANG TUA/WALI

1. Nama Ayah : Syarifuddin
2. Nama Ibu : Maini
3. Pekerjaan Orang Tua : Swasta
4. Alamat Orang Tua : Krueng Raya Aceh Besar